



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SUBJEK PARADOKS DALAM DEMOKRASI PLURALISME  
CHANTAL MOUFFE**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat**

**NUR SAADAH KHUDRI**

**NPM. 0806466014**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT**

**DEPOK**

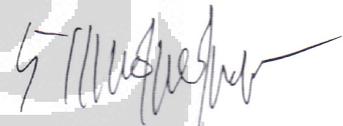
**JUNI 2012**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 25 Juni 2012



**Nur Saadah Khudri**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nur Saadah Khudri

NPM : 0806466014

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :  
Nama : Nur Saadah Khudri  
NPM : 0806466014  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul : Subjek Paradoks Dalam Demokrasi Pluralisme  
Chantal Mouffe

**Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Donny Gahral Adian

Penguji : Dr. Budiarto Danujaya

Penguji : L.G. Saraswati Putri, M.Hum.

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok  
Tanggal : 25 Juni 2012

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia.

Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 196510231990031002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Saadah Khudri  
NPM : 0806466014  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Departemen : Ilmu Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Subjek Paradoks Dalam Demokrasi Pluralisme Chantal Mouffe, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Nur Saadah Khudri)

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali Penulis ucapkan segala puji hanya milik Allah, karena dengan rahmat Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan tak lupa Penulis memberikan penghargaan kepada diri penulis sendiri yang telah mampu bertahan dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian ada satu hal yang tak bisa Penulis lupakan keterlibatan pihak lain yang selalu membantu Penulis dalam proses penulisan ini, oleh karena itu Penulis mengucapkan *terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah mendukung saya selama penulisan skripsi ini hingga selesai dirampungkan.*

Terutama sekali, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak **Donny Gahral Adian** selaku Pembimbing Skripsi saya. Begitu banyak pengajaran yang saya dapatkan selama masa bimbingan dengan beliau. Kemudian kepada **kedua Orang Tua** saya yang selalu bertanya “alah siap skripsinyo?”, dimana dalam pertanyaan itu selalu terkandung sebuah energi baru untuk menyelesaikannya dengan cepat. Dan juga kepada **Ust. Zakiar Asman** yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada Penulis melalui kehangatan **Kopi Hitam Pilihan asli buatan anak nagari** Bukittinggi. Kemudian kepada **Juju** yang telah membantu Penulis dalam memeriksa EYD dalam penulisan ini, dan juga **Kak Subhi**. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Nurul, Meta, Lia, Dela, Abby, Bella, dan teman2 satu bimbingan** yang selalu hadir diwaktu Penulis Sidang maupun Pra sidang. Dan juga kepada **Suhaimel "imel"** yang mempunyai wajah yang mampu meredam kemarahan ketika kesal dan dia orang yang baik hati.

Tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga **UITTC** dimana di **UI TTC** kita dipertemukan oleh bola kecil yang berwarna orange yang selalu kena pukul diatas meja seluas 274 cm x 152,5 cm meskipun dalam waktu yang sekejap.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Saadah Khudri  
NPM : 0806466014  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Departemen : Ilmu Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Subjek Paradoks Dalam Demokrasi Pluralisme Chantal Mouffe, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,

(Nur Saadah Khudri)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Landasan Teori.....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Pernyataan Tesis.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 PERSOALAN SUBJEK DAN SUBJEK PARADOKS</b> .....	14
2.1. Subjek Modern .....	14
2.1.1. Rasionalisme .....	14
2.1.2. Subjek Transendental .....	16
2.2. Subjek Fenomenologi .....	18
2.3. Subjek Paradoks .....	22
<b>BAB 3 DEMOKRASI DAN SUBJEK POLITIK</b> .....	26
3.1. Demokrasi Liberal dan Subjek Politik Sebagai Politik Konsensus .....	26
3.1.1. Demokrasi Liberal.....	26
3.1.2. Subjek Demokrasi Liberal .....	28
3.2. Demokrasi Pluralisme Sebagai Politik Disensus .....	34
3.2.1. Subjek Antagonistik Sebagai Kritik Politik Konsensus.....	34
3.2.2. Pluralisme Agonistik : Sebuah Kontingensi Relasi Antagonis.....	37
<b>BAB 4 SUBJEK PARADOKS DALAM DEMOKRASI PLURALISME</b> <b>    CHANTAL MOUFFE</b> .....	39
4.1. Subjek Modern Sebagai Asumsi yang Membangun Demokrasi Liberal .....	39
4.2. Ketidakmemadainya Subjek Modern dalam Masyarakat Pluralis .....	41
4.3. Subjek Paradoks Sebagai Penopang Subjek Politik Demokrasi Agonistik .....	46
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b> .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56

## ABSTRAK

Nama : Nur Saadah Khudri  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul : Subjek Paradoks Dalam Demokrasi Pluralisme Chantal Mouffe

Persoalan subjek pertama dibahas oleh Decartes dengan menetapkan bahwa subjek adalah subjek rasional. Pandangan subjek yang rasional memberikan dampak terhadap terbentuknya karakteristik cara berfikir modern, yaitu segala sesuatu selalu bersifat total dan utuh. Namun demikian, gagasan tentang subjek yang utuh dan total telah mengabaikan bahwa subjek dibentuk oleh artikulasi bahasa yang tidak stabil yang mengakibatkan bahwa subjek tidak mungkin mencapai sebuah keutuhan dalam ketidak stabilan bahasa. Dalam skripsi ini membahas tentang keadaan ontologis masyarakat yang selalu mengandung ketidak stabilan yang akan memicu konflik dan politik yang selalu membicarakan tentang bagaimana mengatur sebuah konflik agar mencapai kestabilan dalam sebuah masyarakat. Agar tidak terjebak pada kestabilan yang total atau tetap, dimana kestabilan yang total selalu mengabaikan dimensi ontologis masyarakat, maka subjek paradoks dijadikan topangan untuk menjelaskan paradoksal antara ketidak stabilan dan kestabilan dalam demokrasi pluralisme.

Kata kunci : subjek paradoks, identitas, politik, demokrasi pluralisme.

## ABSTRACT

Name : Nur Saadah Khudri  
Major : Philosophy  
Title : The Subject of Paradox in Pluralism Democracy of Chantal Mouffe

The issue about the first subject has been discussed by Descartes who told that subject is a rational subject. The point of view of rational subject give the impact to the formation of characteristic the way of modern thought, that is all the term that have the total and intact quality. However, the issue about the total and intact subject has ignored that subject was formed by the articulation of unstable language that make the subject is impossible to reach the stability in the unstable language. This writting want to discuss about the ontlogical aspect of society that always contain the unstability that caused the conflict and politic that usually discuss about the way to manage a conflict in order to reach the stability in society. In order in order not to get caught to the stability that always ignore the ontological dimension of society, so the paradoxal subject become a strut to explain the paradoxal between the unstability and stability in pluralism democracy.

Key word : Subject of paradox, identities, politic, pluralism democracy

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Antroposentrisme telah menjadikan kebebasan dan hak asasi menjadi sangat penting dalam sebuah masyarakat. Untuk mewujudkan kebebasan dan hak asasi dalam masyarakat, diperlukanlah sebuah negara yang demokratis. Pada abad XX, dikenallah sebuah sistem yang disebut dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal mengasumsikan bahwa sebuah negara yang ideal adalah negara yang dapat menjamin kebebasan dan hak bagi setiap individu. Ketika kebebasan antara individu saling bertabrakan, maka negara wajib melindungi kebebasan itu agar tidak terjadi konflik. Perlindungan yang diberikan negara merupakan hasil konsensus antar individu sebagai warga negara yang diterjemahkan dalam sebuah aturan negara. Hal ini menandakan adanya sebuah konsep yang universal. Konsep yang universal ini merupakan sebuah belenggu bagi kebebasan ini. Dari sini terlihatlah sebuah kontradiksi antara kebebasan dan konsep universal.

Untuk menyelamatkan kebebasan dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu maka muncullah model pemikiran yang melihat bahwa demokrasi bukan untuk melahirkan sesuatu yang universal, melainkan lebih terfokus kepada bagaimana memahami relasi individu yang cenderung bermusuhan, tetapi ada kalanya juga mereka bersepakat.

Carl Schmitt mengatakan bahwa politik itu bukanlah sesuatu yang tunggal dan universal, tetapi politik adalah sesuatu yang plural. Menurut dia, relasi antagonis antara lawan dan kawan dalam ruang publik itulah yang politik. (Schmitt, 1996: 35) Lawan politik di sini maksudnya bukan pada persoalan profit dan reputasi, melainkan pada persoalan tentang sosial konkrit yang berkaitan dengan eksistensial dan ideologis dari sebuah kelompok sosial. Contohnya, dalam persoalan gender, ras, dan agama.

Pemahaman tentang relasi lawan dan kawan ini memberikan wajah baru terhadap demokrasi. Demokrasi pluralisme merupakan wajah baru dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi pluralisme ini juga dikenal dengan istilah demokrasi radikal. Demokrasi ini lebih menekankan kepada ekspresi perbedaan sehingga tidak ada yang dapat di universalkan.

Demokrasi pluralisme pada dasarnya mencoba mengangkat masalah gender, ras, kelas, lingkungan, seksualitas atau wilayah yang sering terlupakan dalam wilayah politik, di mana hal tersebut terabaikan pada konsep demokrasi modern yang hanya terfokus pada persoalan rasionalisme, individualisme dan universalisme. Demokrasi pluralisme menuntut diakuiinya perbedaan tetapi tidak menolak universalisme namun merupakan artikulasi antara yang partikular dan yang universal. Artikulasi inilah yang menghasilkan sebuah nilai pluralis yang sangat mempengaruhi makna subjek politik.

Pada era modern dipahami adanya kesatuan subjek, hal ini merujuk pada konsep yang dikembangkan Descartes tentang subjek. Descartes mengatakan bahwa subjek itu adalah sesuatu yang rasional dan tunggal. Descartes melihat bahwa hubungan manusia dengan dunia terpisah. Artinya, dunia yang ada di sekeliling manusia tidak mempengaruhi manusia. Namun, Heidegger mengkritik konsep Descartes ini. Dia mengatakan bahwa hubungan subjek dan dunia tidak terpisah dengan memasukkan istilah *Dasein* yang artinya menjadi-dalam-dunia, dunia yang telah terbahasakan, manusia itu bagaikan terlempar pada dunia itu, tanpa ada konsep – konsep yang mengiringi manusia itu, maka dunia sekitarnyalah yang membentuk manusia, sehingga mengakibatkan tidak adanya subjek yang otentik karena setiap subjek selalu diciptakan oleh dunianya.(Adian,2010:54) Ketidakotentikan subjek itu menandakan bahwa subjek itu bersifat *detotalized* dan merupakan hasil dari artikulasi yang partikular dan universal melalui praktek bahasa. *Detotalized* adalah sebuah kondisi dimana subjek tidak total. *Detotalized* ini menjadikan subjek itu tidak stabil, selalu mengalami perubahan mengiringi perubahan bahasa itu sendiri. Dengan artikulasi ini akan membentuk posisi subjek dalam sebuah struktur diskursif yang tidak stabil sehingga tidak ada identitas sosial yang sepenuhnya permanen.

Dalam ketidakstabilan, subjek selalu ingin keutuhan, karena adanya kekurangan primordial, meminjam istilah Lacan. ( Adian, 2011: 129) Dalam proses mencapai keutuhan ini, maka ada proses hegemoni di mana sebuah subjek sosial dapat mengartikulasikan kepentingan subjek sosial lain yang bersifat persuasif melalui aksi kekuasaan. Dalam proses hegemoni ini, subjek tidak akan dapat mencapai sebuah keutuhan tersebut karena setiap dia mengartikulasikan sesuatu, maka dia akan mengecualikan yang lainnya. Contohnya, ketika subjek itu mengartikulasikan dirinya sebagai dosen, maka dia bukan mahasiswa dan pegawai. Pengecualian ini bisa terjadi karena subjek dibangun dari persimpangan keberagaman posisi subjek. Posisi subjek adalah lokus bagi multiplisitas dari relasi-relasi sosial – bukan hanya relasi sosial produksi, tetapi juga relasi-relasi sosial seperti seks, ras, nasionalitas, dan lingkungan. Semua hubungan-hubungan sosial ini mendeterminasi personalitas atau posisi subyek, karena setiap subjek merupakan lokus dari sejumlah posisi subyek dan tidak dapat direduksi hanya kepada satu posisi. Contohnya, seseorang buruh yang ada dalam hubungan produksi, adalah juga laki-laki atau perempuan, berwarna kulit putih atau kulit hitam, beragama Katolik atau Protestan, berkebangsaan Perancis atau Jerman, dan seterusnya. Oleh karena itu, pengecualian ini menghasilkan adanya konsep “kami” dan “mereka”, mereka yang masuk dalam *demos* dan mereka yang berada dalam *demos*. Untuk memahami hubungan “kami” dan “mereka”, kita dapat melihatnya ketika kita masuk ke dalam sebuah *demos* atau ruang kolektif. Dalam *demos*, hubungan keduanya akan selalu terjadi ketegangan, karena “mereka” ingin menjadi “kami”, dan “kami” akan selalu mengecualikan “mereka”. Untuk menghadapi ketegangan ini, era modern melakukan negosiasi antara “kami” dan “mereka” agar tercipta kesepakatan dan kesatuan antara keduanya, hal ini mengasumsikan bahwa antara “kami” dan “mereka” mempunyai ide yang sama, tapi pada post modern ketegangan merupakan entitas yang melekat pada prinsip *demos* itu sendiri, karena mengasumsikan bahwa keduanya dibangun atas perbedaan yang selalu melekat pada dirinya. Konsep ini dapat dipahami kalau kita memahami bahwa hubungan antara “kami” dan “mereka” tidak dapat direduksi dengan sebuah

dialektika negasi, antara “kami” dan “mereka” tidak dapat dibandingkan, karena “kami” tidak akan ada kalau tidak ada “mereka”.

Hal ini berhubungan dengan konsep kawan dan lawan (*friend and enemy*) yang dikembangkan oleh Schmitt. Schmitt mengatakan bahwa politik itu adalah hubungan kawan dan lawan, itu merupakan hubungan yang konkret. Tetapi, Mouffe mempunyai pandangan yang berbeda, yaitu pada dasarnya hubungan antara kawan dan lawan tidak selalu begitu, tapi adakalanya lawan itu merupakan kawan, hubungannya paradoks. Konsep ini lah yang disebut dengan konsep agonisme. Agonisme mendefenisikan bahwa lawan akan menjadi kawan ketika dia berbagi ruang simbolik umum dan menjadi lawan karena mereka ingin mengatur ruang simbolik umum itu. (Mouffe, 2000: 102) Simbolik di sini tidaklah dipahami sebagai referensi linguistik murni, tetapi sesuatu yang melibatkan berbagai praktek material, ritual, dan lembaga.

Dengan melihat dari persoalan bahwa demokrasi pluralisme Chantal Mouffe lebih menekankan pada persoalan artikulasi dan adanya perkembangan makna subjek dari subjek yang rasional sampai kepada subjek yang tidak stabil. Namun, dari ketidakstabilan itu, subjek tetap masih merindukan sebuah kestabilan. Paradoks antara ketidakstabilan dan kestabilan ini membuat penulis tertarik untuk membahas secara lebih mendalam tentang subjek paradoks yang terdapat pada konsep demokrasi pluralis.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelaahan genetik dari permasalahan subjek, pada awalnya subjek dipahami sebagai sebuah kesatuan. Descartes mengatakan bahwa subjek itu adalah sesuatu yang rasional dan tunggal. Descartes melihat bahwa hubungan subjek dengan dunia terpisah. Keterpisahan antara subjek dan dunia ini membuat Descartes lebih mengutamakan aku yang berfikir.

Aku yang berfikir yang ditawarkan oleh Descartes dikritik oleh Heidegger. Heidegger mengasumsikan bahwa subjek dan dunia itu tidak bisa dipisahkan. Dengan konsep *Dasein* yang artinya menjadi-dalam-dunia, subjek dipahami sebagai sebuah ketelemparan pada dunia. Ketika subjek terlempar maka dunia lah yang akan membentuk subjek itu, dimana dunia dipahami sebagai sesuatu yang telah terbahasakan. Keterbentukan subjek oleh dunia yang telah terbahasakan membuat subjek tidak dapat mencapai sebuah keotentikan seperti yang digagas oleh Deccartes. Ketidak otentikan itu disebabkan oleh pembentukan subjek selalu mengiringi dari praktek bahasa yang selalu berubah yang tidak bisa lepas dari entitas dari dunia itu sendiri. Kesenantiasaan subjek mengiringi praktek bahasa ini membuat subjek dari yang tidak otentik menjadi subjek yang tidak stabil. Artikulasi semacam ini akan membentuk posisi subjek dalam sebuah struktur diskursif yang tidak stabil sehingga tidak ada identitas sosial yang sepenuhnya permanen.

Dengan meminjam istilah Lacan, subjek yang tidak stabil selalu ingin kestabilan karena adanya keterpisahan primordial. Dalam proses untuk mencapai kestabilan ini, maka hegemoni diperlukan yang bertujuan untuk menstabilkan praktek artikulasi yang selalu berubah. Hegemoni dapat dipahami sebagai aktifitas subjek sosial yang dapat mengartikulasikan kepentingan subjek sosial lain yang bersifat persuasif melalui aksi kekuasaan. Dalam proses hegemoni ini, subjek tidak akan dapat mencapai sebuah keutuhan tersebut karena setiap dia mengartikulasikan sesuatu, maka dia akan mengecualikan yang lainnya.

Pengecualian ini akan menimbulkan relasi antagonistik antara subjek. Antagonistik ini mengumpamakan adanya hubungan *kami* dan *mereka*, hubungan tersebut menghasilkan hubungan *kawan* dan *lawan*. Namun, Mouffe melihat bahwa relasi antagonistik ini tidak selalu begitu. Mouffe melihat bahwa ketika subjek itu berada pada wilayah simbolik umum, maka ada dua kategori aktifitas subjek, yaitu “diatur” dan “mengatur”. Dalam proses aktifitas tersebut, subjek yang awalnya terjalin dalam hubungan *kawan* dan *lawan* dapat menjadi hubungan perkawanan dalam pemusuhan atau hubungan *agonistik*.

Hubungan perkawanan dalam permusuhan ini terlihat adanya hubungan subjek yang paradoks. Subjek paradoks yang dihasilkan oleh konsep agonistik Mouffe dapat dilihat dari sudut pandang konsep subjek yang dikembangkan oleh David Carr. Carr juga mengemukakan tentang subjek paradoks, namun perbedaannya adalah Mouffe berangkat dari sisi subjek yang berada dalam wilayah simbolik umum, sedangkan Carr melihat dari sudut pandang wilayah subjek transendental dan subjek empirik. Meskipun begitu, subjek paradoks yang dikemukakan oleh keduanya mempunyai titik berangkat yang sama, yaitu melihat bahwa subjek itu bukan merupakan sebuah *hypokeimenon* atau substansi. Persoalannya adalah bagaimana subjek yang paradoks yang dijelaskan Carr dapat menjelaskan kondisi subjek paradoks yang dijelaskan oleh Mouffe dalam wilayah simbolik umum yang menjadi landasan Mouffe dalam menjelaskan demokrasi pluralisme, oleh karena itu maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan subjek paradoks?
2. Apakah yang di maksud dengan demokrasi pluralisme yang dikemukakan oleh Chantal Mouffe?
3. Bagaimana demokrasi pluralisme yang dikemukakan oleh Chantal Mouffe menghasilkan subjek paradoks dan kenapa harus subjek paradoks?

### 1.3. Landasan Teori

Alat untuk mengupas persoalan subjek paradoks dalam tulisan ini, berawal dari pandangan Chantal Mouffe mengenai demokrasi pluralisme. Pandangan Mouffe tentang demokrasi pluralisme berawal dari pemaknaan ulang terhadap konsep politik. Schmitt mengatakan bahwa politik bukanlah membahas tentang bagaimana sebuah negara mengatur masyarakat dan bagaimana mencapai kekuasaan, tetapi lebih melihat relasi antara subjek politik, yaitu relasi lawan dan kawan. Schmitt mengatakan dalam bukunya *the concept of political*:

*“the word "political," nor did his concept contain an immediate reference to the word "state". Political did not refer to any particular concrete subject matter. Concept of the political derived simply from the distinction between friend and enemy”.*( p.35)

Relasi antara lawan dan kawan ini bersifat antagonistik. Antagonistik menurut Schmitt adalah

*“The friend-enemy relation; this involves the creation of a 'we' which stands in opposition to a 'them', and it is located, from the outset, in the realm of collective identification”.*(Mouffe, 1993: 123)

Relasi antara lawan dan kawan ini menimbulkan oposisi antara hubungan ‘kami’ dan ‘mereka’. Mereka yang masuk dalam *demos* dan mereka yang berada dalam *demos*. Untuk memahami hubungan ‘kami’ dan ‘mereka’, kita dapat melihatnya ketika kita masuk ke dalam sebuah *demos* atau ruang kolektif, dalam *demos* hubungan keduanya akan selalu terjadi ketegangan karena “mereka” ingin menjadi “kami” dan “kami” akan selalu mengecualikan “mereka”.( Mouffe, 2000: 56) Hal ini membuat hubungan lawan dan kawan menjadi sesuatu yang tetap. Tidak perlu usaha untuk mendamaikan hubungan antara kawan dan lawan ini.

Namun Mouffe melihat bahwa pada dasarnya hubungan antara kawan dan lawan tidak selalu begitu, adakalanya lawan itu merupakan kawan, atau sebaliknya. Konsep ini lah yang disebut dengan konsep agonisme. Mouffe menyebutkan dalam bukunya *the democratic paradox* bahwa agonisme adalah

*“Agonistic pluralism, the aim of democratic politics is to construct the ‘them’ in such a way that it is no longer perceived as an enemy to be destroyed, but as an ‘adversary’, that is, somebody whose ideas we combat but whose right to defend those ideas we do not put into question”.*

*“Adversary is an enemy, but a legitimate enemy, one with whom we have some common ground because we have a shared adhesion to the ethico-political principles of liberal democracy”*(p. 102)

Prinsip dasar dari *ethico – political* adalah selalu mengalami diskursif dan penuh dengan perbedaan. Sebagaimana dalam bukunya dikatakan bahwa:

*”those ethico – political principles can only exist through many different and conflicting interpretation. Such a consensus is bound to be a conflictual consensus. This is indeed the privileged terrain of agonistic confrontation among adversaries”*.( Mouffe, 2000: 12)

Hubungan agonistik ini akan sangat terlihat ketika *ethico - political* dikaitkan dengan ruang simbolik. Lawan akan menjadi kawan ketika dia berbagi ruang simbolik umum dan menjadi lawan karena mereka ingin mengatur ruang simbolik umum itu. Ruang simbolik umum di sini tidaklah dipahami sebagai referensi linguistik murni, tetapi sesuatu yang melibatkan berbagai praktek material, ritual dan lembaga (*characteristic of the holistic mode of social organization* ).”( Mouffe, 2000: 103)

Kemunculan relasi antara lawan dan kawan ini berawal dari penafsiran ulang terhadap makna subjek. Berawal dari kritik Heidegger terhadap konsep subjek Descartes, dia mengatakan bahwa hubungan subjek dan dunia tidak terpisah dengan memasukkan istilah *Dasein* yang artinya menjadi-dalam-dunia, dunia yang telah terbahasakan, manusia itu bagaikan terlempar pada dunia itu, tanpa ada konsep-konsep yang mengiringi manusia itu, maka dunia sekitarnya adalah yang membentuk manusia. Sehingga mengakibatkan tidak adanya subjek yang otentik selalu diciptakan oleh dunianya. Oleh karena itu, dengan ketidakotentikan subjek itu menandakan bahwa subjek itu bersifat *detotalized* yang merupakan hasil dari artikulasi melalui praktek bahasa. *Detotalized* ini menjadikan subjek itu tidak stabil, selalu mengalami perubahan mengiringi perubahan bahasa itu sendiri. Dengan artikulasi ini akan membentuk posisi subjek dalam sebuah struktur diskursif yang tidak stabil sehingga

tidak ada identitas sosial yang sepenuhnya permanen. Mouffe mengatakan dalam bukunya *The Return of Political*

*“Subject as a decentred, detotalized agents a subject constructed at the point of intersection of a multiplicity of subject positions between which there exists no a priori or necessary relation and whose articulation is the result of hegemonic practices”*”.( Mouffe, 1993: 12)

Untuk dapat memahami subjek yang terdapat dalam hubungan agonistik antara lawan dan kawan lebih dalam, penulis menggunakan landasan teori dari David Carr tentang subjek. Dengan adanya perumusan ulang terhadap makna subjek yang utuh, maka subjek bukan lagi dipahami sebagai sesuatu yang utuh, tetapi subjek yang berelasi dengan dunia. Artinya, keberadaan subjek ditentukan oleh keberadaan *the Other* (yang ada diluar dirinya). David Carr mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Paradox of Subjectivity: the self transcendental tradition*, yaitu *“I is part of the world, reflecting in the natural way, I take myself to be a person among persons, even a thing among thing”*(p. 115)

Keberadaan *the Other* sangat menentukan terhadap keberadaan subjek itu. Saya dapat mengatakan saya sebagai ‘saya’ karena ada orang lain. Tanpa *the Other* keberadaan ‘saya’ menjadi tidak ada.

Namun, di lain sisi terlihat bahwa ketika saya mengatakan adalah ‘saya’ maka hal ini akan berkaitan dengan *self – consciousness* atau kesadaran diri. Oleh karena itu, Carr mengatakan bahwa *self – consciousness* harus ada sebelum kita dapat mengidentifikasi bahwa *the Other* itu penting terhadap keberadaan ‘saya’.

Dalam hal ini, Carr melihat adanya paradoks antara hubungan antara subjek dengan *the Other* dan subjek yang memiliki *self – consciousness*. Carr mengatakan *“self-consciousness takes precedence over the other; they are just alternatives”*.(Carr, 1999: 135) Carr juga mengatakan bahwa kemunculan *the Other* adalah sesuatu yang tidak nyata. (Carr, 1999: 135)

Dalam hal ini Carr mendefenisikan subjek sebagai berikut:

*“Subject is revealed not as an underlying substance or hypokeimenon that absorbs or overpowers the world by reducing it to its representations, but as a spontaneous and self-related subject of intentionality and meaning. It is the prime condition of the possibility of the world, but only insofar as the world has meaning for us; it does not determine the world's being. Transcendental philosophy recognizes that the world may be more than, and other than, its appearance to us”.*(Carr, 1999: 134)

Berdasarkan teori di atas, penulis akan mencoba menelaah persoalan subjek yang terdapat pada konsep demokrasi pluralism. Teori dari Schmitt, Mouffe akan digunakan untuk menjelaskan persoalan demokrasi pluralisme secara mendalam pada bab selanjutnya.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik yang diangkat dalam penulisan ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Penulis ingin membuktikan bahwa dalam hubungan agonistik dalam konsep demokrasi pluralisme yang dipaparkan oleh Chantal Moeffe mengandung subjek paradoks.
2. Penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat persoalan subjek politik dari sudut pandang yang berbeda. Artinya tidak lagi melihat subjek sebagai substansi tetapi subjek yang berelasi dengan realitas yang ada disekitarnya yang berdasarkan dari sifat subjek yang tak dapat mencapai hal yang substantif pada dirinya.

### 1.5. Pernyataan Tesis

Dalam Demokrasi Pluralisme Chantal Mouffe, relasi agonistik antara lawan dan kawan menjadi keniscayaan. Karena hubungan lawan dan kawan terikat dalam konteks etiko politik, sehingga harus dicari kesamaan dalam perbedaan yang takterjempatani. Agar tidak terjebak pada kesamaan yang final dan selalu menghormati perbedaan tersebut, maka penulis melihat bahwa subjek paradoks merupakan sebuah realitas dalam masyarakat pluralis yang demokratis.

### 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur dan refleksi kritis. Metode literatur, penulis menggunakan dua kategori rujukan data, yakni data primer dan data sekunder.

Data primer secara langsung berisi konsep-konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya yang dihasilkan oleh Chantal Mouffe, yaitu *Demokrasi Paradoks* dan *Return of Political* serta *The Paradoks of Subjektiviti* karya David Carr. Data sekunder merupakan karya-karya lain serta data yang berasal dari berbagai *website* yang membahas pemikiran demokrasi Chantal Mouffe dan yang membahas tentang subjek

Selanjutnya penulis akan melakukan analisis refleksi kritis untuk melihat bahwa demokrasi pluralisme menghasilkan makna subjek yang paradoks.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk membahas masalah pada skripsi ini serta untuk mencapai tujuan penulisan yang telah disebutkan di atas, maka disusun sistematika penulisan dengan membagi pokok-pokok tulisan dalam lima bab. Setiap bab diperinci lagi dalam

bagian yang lebih kecil sesuai dengan urutan permasalahannya. Adapun sistematika penulisan ini secara garis besar adalah :

Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, kerangka teori, dan sistematika penulisan

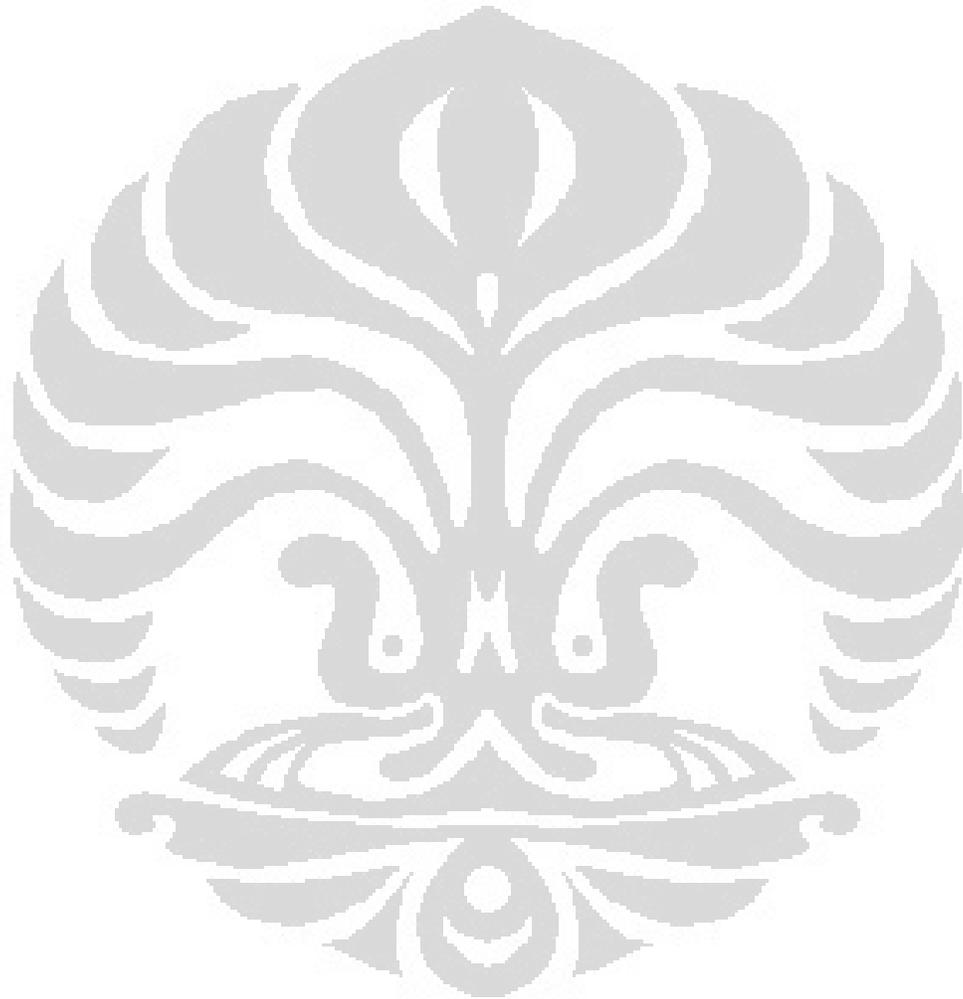
Bab kedua, menguraikan tentang pengertian konsep subjek sepanjang sejarah filsafat, yang diawali pada subjek modern, subjek transendental dan subjek fenomenologis untuk menuju kepada pengertian subjek paradoks. Dalam bab ini, penulis menjabarkan bagaimana relasi subjek dan objek dari pandangan Descartes sampai ke Ponty. Perjalanan relasi subjek dan objek ini akan mengantarkan pembaca dalam memahami subjek paradok.

Bab ketiga, menguraikan demokrasi dan subjek politik. Dalam bab ini penulis memaparkan bagaimana demokrasi liberal dan subjek politik liberal sebagai politik konsesus yang nantinya akan mengantarkan kepada pemaparan tentang demokrasi pluralisme sebagai politik konsensus yang ditopang dengan pemaparan tentang konsep subjek antagonistik sebagai kritik terhadap politik konsensus. Subjek antagonis ini akan dikritik lagi oleh Moufee sebagai pokok pembahasan dalam skripsi ini dengan mengutarakan konsep pluralisme agonistik sebagai kontingensi relasi antagonis.

Bab keempat, analisa filosofis terhadap subjek paradoks dalam demokrasi pluralisme. Penjelasan pada bab ini dimulai dengan penjelasan tentang bagaimana subjek modern sebagai asumsi yang membangun demokrasi liberal, dengan penjelasan ini penulis ingin melihat bagaimana ketidakmemadai subjek modern dalam pluralis dan pada akhirnya penulis dapat melihat bahwa subjek paradoks sebagai asumsi subjek politik demokrasi agonistik.

Bab kelima berisikan kesimpulan. Pada bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dari apa yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, sehingga

pembaca dapat melihat persoalan yang penulis jabarkan dengan gampang untuk dipahami.



## BAB 2

### PERSOALAN SUBJEK DAN SUBJEK PARADOKS

Persoalan subjek dalam diskursus filsafat merupakan persoalan yang telah lama berkembang dan dibahas oleh banyak filsuf. Persoalan utama dari wacana tentang subjek adalah persoalan kedirian dan relasinya dengan diri yang lain serta lingkungan sekitar.

Untuk sampai kepada pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan subjek paradoks, maka pada bab ini, penulis ingin menerangkan geneologi dari perkembangan subjek. Secara umum, geneologi tentang subjek dapat dilacak dari subjek modern, subjek fenomenologi, kemudian sampai kepada subjek paradoks.

#### 2.1. Subjek Modern

Persoalan subjek mulai menjadi kajian serius semenjak Rene Descartes memulai doktrin *cogito* yang senantiasa mempertanyakan kehadiran segala sesuatu termasuk kesadaran akan diri sendiri (*self-consciousness*). Setidaknya ada beberapa pandangan yang berkembang pada era modern dan kaitannya dengan wacana tentang subjek. Diantaranya adalah rasionalisme dan subjek transendental.

##### 2.1.1. Rasionalisme

Rasionalisme adalah aliran yang beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh hanya dari rasio atau kesadaran kita. Konsep rasionalitas pertama kali diperkenalkan oleh Rene Descartes. Bagi Descartes, rasionalitas bukan sesuatu yang tertanam di alam melainkan dalam diri aku yang berpikir. Posisi manusia sebagai aku yang berpikir membuatnya menjadi *subjectum*, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. (Hardiman, 2007:3)

Descartes mendasari aku yang berfikir di atas konsep keraguan. Konsep keraguan tersebut ia formulasikan dalam sebuah kalimat *cogito ergo*

*sum* (saya berfikir, maka saya ada). Ia yang ragu merupakan subjek yang sedang berpikir. Sebagaimana Descartes mendefinisikan konsep “aku” dalam bukunya yang berjudul *Meditation on First Philosophy*, yaitu:

“ *But what then am I? A thing which Thinks. What is thing which thinks? It is a thing which doubts, understands, (conceives), affirms, denies, wills, refuses which also imagines and feel*”.(p. 75)

Pada dasarnya konsep keraguan yang ditawarkan oleh Descartes ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan kepastian yang kokoh, yaitu “*cogito*” atau kesadaran diri. *Cogito* itu dapat dipahami sebagai kebenaran dan kepastian yang tak tergoyahkan karena aku mengerti secara jelas dan terpilah-pilah. *Cogito* itu tidak ditemukan dengan deduksi dari prinsip-prinsip umum atau dengan intuisi. (Hardiman,2007:39)

Untuk mencapai sebuah *cogito*, Descartes mengatakan bahwa ada pikiran sebagai idea bawaan yang sudah melekat sejak kita dilahirkan. Dia menyebut ide bawaan itu dengan istilah *res cogitan*. Sementara ketubuhan yang dapat ditangkap melalui penyerapan indrawi, ia sebut dengan istilah *res extensa*. *Res extensa* bagi Descartes merupakan sesuatu yang dapat saja memberikan kesan yang menipu. Oleh karena itu, Descartes lebih mengutamakan pikiran yang bersifat independen dari tubuh atau materi.

Dengan mengutamakan pikiran sebagai kebenaran, maka Descartes telah meremehkan peran tubuh. Artinya, Descartes telah memisahkan antara peran pikiran dan tubuh. Keterpisahan antara pikiran dan tubuh berarti keterpisahan antara subjek dan objek. Hal ini dapat dilihat bahwa subjek adalah diri yang berpikir, sedangkan yang diamati oleh subjek adalah objek. Subjek yang berpikir mempunyai kedudukan yang lebih penting daripada objek.

Keterpisahan antara subjek dan objek membuat aku yang berpikir adalah aku yang melepaskan segenap keterlibatanku dengan dunia. Semua yang bersinggungan dengan aku berpikir kehilangan relasi eksistensialnya dengan aku.

Pandangan Descartes tentang *cogito* (aku berpikir) selalu merupakan *cogito me cogitare* (aku berpikir tentang diriku). Kesadaran tentang objek senantiasa disertai kesadaran tentang diri. Merepresentasikan sesuatu senantiasa merepresentasikan sesuatu ke diri. Orang yang merepresentasikan objek juga merepresentasikan dirinya. Representasi tentang diri ini mendahului representasi objek. (Carr,1999:19)

Rasionalitas yang ditawarkan oleh Descartes ini mendapatkan kritikan dari para pemikir empiris. John Locke mengemukakan bahwa pengalaman merupakan bahan mentah bagi rasio. Pikiran manusia merupakan kertas putih dan pengalaman akan memberikan corak pada kertas putih itu. Subjek pada pandangan kaum empiris bukanlah sebagai substansi yang *immaterial* dan ditemukan semata-mata dalam kesadaran, namun subjek itu bersifat empiris. Artinya subjek itu dapat di indra. Kritik kaum empiris terhadap subjek Descartes disebabkan karena menurut kaum empiris kesadaran kita tidak lain merupakan kesadaran empiris yang selalu berada dalam koridor pengindraan.

### 2.1.2. Subjek Transendental

Pertentangan antara Descartes dan Locke, antara rasionalisme dan empirisme merupakan usaha untuk melakukan korespondensi antara pikiran dan realitas, antara subjek dan objek. Korespondensi ini dikaji lagi dalam bentuk yang berbeda oleh Kant. Menurut Kant, pengalaman indrawi itu penting dalam mencapai pengetahuan, Namun, pengalaman indrawi tidak akan berguna kalau tidak ada putusan yang bersifat *a priori*. Kant mengatakan bahwa pengalaman indrawi hanya sekedar memberikan data mentah untuk kita, namun pikiranlah yang menyusunnya secara sistematis. Pengetahuan pun akan menjadi mungkin kalau ada konsep-konsep formal yang sudah ada dalam pikiran kita. (Carr,1999:35)

Untuk menjadikan pengalaman indrawi itu mungkin menjadi pengetahuan *a priori*, Kant menawarkan konsep transendental, di mana

subjek yang aktif. Sebuah aktifitas yang memaksakan struktur-strukturnya pada kesan indrawi yang disampaikan dari luar subjek. Oleh karena itu, bagi Kant, subjek merupakan aktifitas yang mensintesisasikan pengalaman-pengalaman menjadi suatu pengetahuan tentang objek. Subjek merupakan suatu ikatan transendental yang berfungsi menyatukan keberagaman pengalaman manusia.(Hardiman,2007:133)

Kesatuan pengalaman itu dapat dipahami dengan ilustrasi ketika Aku tahu persis bahwa setelah air dipanaskan dalam suhu seratus derajat akan mendidih. Pengetahuan itu dimungkinkan karena aku yang mengalami air mendidih dan aku yang melihat angka di termometer adalah aku yang sama. Aku adalah syarat yang memungkinkan kepastian sekaligus kesatuan pengetahuan. (Adian,2011:100) Hal ini berbeda dengan Descartes yang melihat bahwa subjek merupakan substansi yang berfikir, yang melepaskan pengaruh pengalaman dalam proses memahami.

Subjek yang aktif dapat mengkombinasikan antara apa yang digambarkan oleh pengalaman indrawi (*aposteriori*) dengan apa yang kita pikirkan. Kombinasi ini, Kant menyebutnya sebagai apersepsi transendental.(Carr,1999:36)

Apersepsi transendental, yaitu kesatuan diri yang memungkinkan kesatuan pengalaman. Pengalaman yang datang silih berganti harus memiliki kesatuan supaya disebut pengetahuan *a priori*.(Adian,2011:100) Oleh karena itu, Kant tidak memfokuskan perhatiannya pada objek, tetapi lebih kepada cara rasio (pikiran) kita memahami objek dan itu bersifat *a priori*.

Bagi Kant, pengetahuan manusia muncul dari dua sumber di dalam pikiran manusia. Sumber pertama adalah sensibilitas yang menangkap kesan indrawi yang telah tertata dalam ruang dan waktu atau kemampuan subjek untuk menerima representasi objek. Representasi objek dibagi dalam dua unsur, yaitu unsur materi dan unsur forma. Unsur materi adalah sesuatu yang berkaitan dengan isi penginderaan itu, sedangkan unsur forma adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan berbagai penampakan itu tersusun dalam hubungan-hubungan tertentu.(Hardiman,2007: 137)

Sumber yang kedua adalah pemahaman atau *understanding*, yaitu sumber yang dengan kategori *a priori* yang dimilikinya mengkonstitusi kesan-kesan indrawi menjadi pengetahuan. ( Adian, 2001: xiv)

Berpikir, bagi Kant, adalah membuat putusan. Dalam putusan terjadi sistesis antara data indrawi dan unsur-unsur *a priori* yang disebut dengan kategori – kategori. Bagi Kant kategori – kategori itu ada seiring dengan adanya subjek, artinya ketika subjek itu lahir, kategori itu telah ada. Tanpa sintesa itu, kita dapat menginderai penampakan, tetapi tidak dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, kategori-kategori itu merupakan syarat *a priori* pengetahuan. Maka, objek itu, bagi Kant, harus menyesuaikan diri dengan kategori -kategori itu. Objek itu tampak hanya dengan kategori subjek.(Hardiman,2007: 41)

Kategori bagi subjek merupakan sesuatu yang terberi. Artinya, setiap manusia telah mempunyai kategori-kategori tersebut. Keterberian kategori inilah yang memungkinkan kesatuan pengalaman dalam diri manusia terjadi.

## 2.2. Subjek Fenomenologi

Fenomenologi adalah kajian tentang penampakan-penampakan (fenomena). Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* (*phainomai*, menampakkan diri) dan *logos* (akal budi). Maka, fenomenologi adalah ilmu tentang apa yang menampakkan diri kepengalaman subjek. Artinya, fenomenologi tidak membicarakan tentang esensi yang ada di balik sesuatu. (Adian, 2010:5)

Subjek fenomenologi berangkat dari keterpisahan antara subjek dan objek yang diwariskan oleh dualismenya Descartes. Meskipun kemudian Kant mencoba mendamaikan keduanya, namun Kant masih terjebak pada keterfokusan terhadap subjek yang berpikir sebagai bentuk transendental. Subjek fenomenologi juga membahas tentang keterkaitan antara subjek dan objek, namun subjek fenomenologi tidak lagi membicarakan apa itu subjek, tapi lebih membicarakan

relasi antara kondisi penampakan dari benda dan subjektivitas manusia. Hal inilah yang membedakannya dengan subjek modern dan subjek transendentalnya Kant, di mana keduanya masih terfokus pada subjek yang bersubstansi.

Selain menghindari diri dari hal yang bersifat substansi, subjek fenomenologi mengembalikan posisi subjek kepada subjek yang berkebiasaan, penuh dengan pengalaman konkret, lekat dan dihayati, di mana hal ini direduksi oleh konsep subjek modern. Subjek harus dipahami sebagai sesuatu yang selalu terlibat secara aktif dengan dunia.

Subjek fenomenologi pertama kali dikemukakan oleh Edmund Husserl. Husserl melihat subjek fenomenologi sama dengan subjek yang bertujuan dan selalu terarah kepada dunia. Keterarahan itu terjadi karena Husserl memasukkan unsur intensionalitas dalam menjelaskan relasi subjek yang berkesadaran dengan fenomena. Intensionalitas ini bukanlah merupakan sikap mental dari subjek, tetapi lebih melihat sebagai “relasi langsung” yang dapat mengantar fenomena kepada subjek yang berkesadaran.

*“Husserl said : Merely having content inside it such as the experiences of sense, but unable to interpret these objectively.... Incapable, therefore, of referring to objects would not be a mental or conscious being (Carr,1999:70)*

Konsep “relasi langsung” ini bertujuan untuk menghilangkan asumsi-asumsi yang sering dilekatkan kepada objek. Hal ini bertujuan untuk menciptakan realitas yang bebas dari prasangka-prasangka atau lebih dikenal dengan istilah objek yang otentik. (Adian,2010:27)

Untuk mencapai objek yang otentik ini, Husserl menawarkan konsep metodis, yaitu *epoche*, yaitu penundaan asumsi terhadap realitas guna memunculkan hakikat. *Epoche* mengisyaratkan reduksi-reduksi tertentu untuk mengurangi gejala aksidental yang ada pada objek, yaitu reduksi *eidetis*, reduksi fenomenologis, reduksi transendental. Reduksi *eidetis* diarahkan kepada objeknya agar mendapatkan hakekat. Reduksi fenomenologis diarahkan kepada subjek dengan cara mengurung (*bracketing*) asumsi-asumsi yang merupakan sikap

alamiah (*natural attitude*) manusia. Sedangkan reduksi transendental adalah pengurangan terhadap keberadaan realitas secara keseluruhan.(Adian,2010:29-30) Setelah proses reduksi ini selesai, maka subjek dapat menangkap fenomena objek yang otentik.

Konsep subjek yang ditawarkan oleh Husserl merupakan interrelasi antara subjek yang berkesadaran dan objek yang masih mempertahankan “ego transendental”. Ego Transendental adalah ego yang berkesinambungan dan tunggal sebagai syarat kesatuan pengetahuan. Hal ini berbeda dengan konsep subjek yang dikemukakan oleh Heidegger yang berangkat dari konsep fenomenologinya.

Bagi Heidegger, subjek adalah *dasein*, *da* adalah di sana sedangkan *sein* adalah ada. Artinya, subjek yang ada di sana. Bagi dia subjek tidak pernah terlepas dari dunia yang didiaminya. (Adian,2010:111) Maksud ada di sana adalah ada dalam ruang dan waktu. Keberadaan manusia selalu terjebak dalam ruang dan waktu.

Kata *dasein* digunakan untuk membedakan antara “Ada” manusia dengan “Ada” dengan. Esensi *dasein* adalah eksistensinya. *Dasein* mampu mempermasalahkan Ada-nya sendiri.

*“ Man questions his own Being and that of order things in the world. He is al ways – no matter how vargue a way – aware of his being in the world. Heidegger called the Being of this questioner who already has some understanding of Being in general “ existence “ or dasein”.*(Heidegger,1993:19)

Menurut Heidegger manusia tidak dapat memisahkan diri dari apa yang ada di luar dirinya karena *dasein* selalu dibentuk oleh aktivitas bersama karena dunia yang ditempati manusia merupakan dunia bersama.

*Dasein* mengungkapkan tiga karakter atau sturktur “ada-dalam-dunia”, (Adian,2010:53) yaitu:

- Faktisitas (situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia), yaitu kondisi yang tidak mungkin yang lain, yang sangat dekat hubungannya pada struktur “ada dalam dunia” yang berarti bahwa kondisi telah bermakna begitu saja.
- Pemahaman, yaitu *dasein* adalah satu-satunya yang memiliki kemungkinan-kemungkinan cara berada.
- Kejatuhan, artinya *dasein* dalam kesehariannya tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan sebagai manusia kolektif.

Konsep *dasein* yang ditawarkan oleh Heidegger melenyapkan keterpisahan antara subjek dan objek. Konsep ini menyatukan subjek dan objek secara harmonis dimana subjek “ada bersama-sama” dengan objek. (Mulhall, 2005:44)

Heidegger berbeda dengan Merleau Ponty. Ponty tidak membahas tentang bagaimana subjek itu dapat menemukan hakekat dari realitas dengan melakukan reduksi yang dikemukakan oleh Husserl dan juga dia memperdalam pandangan Heidegger tentang subjek yang mendunia. Ponty melihat subjek sebagai subjek yang mempersepsikan. Yang dimaksud dengan persepsi adalah tubuh. (Baldwin, 2007:2) Tubuh yang dipahami sebagai tempat diwujudkannya diri di dunia. (Adian, 2010:94) Artinya, tubuh lah yang akan mengantar kepada pengetahuan. Ketika kita berhubungan dengan dunia, maka kita berhubungan dengan tubuh. Apa yang tubuh kita katakan itu lah pengetahuan.

*“ My body, as it were, perceives the world for me. My body is already at with the world, before the offices of understanding: ‘ the things....is not first of all a meaning for the understanding, but a structure accessible to inspection by the body’.”* (Baldwin, 2007:3)

Dalam hal ini, Ponty ingin mengatasi kesenjangan antara fisik dan mental sebagaimana yang telah digagas oleh Descartes. Mengatasi atas kesenjangan antara fisik dan mental ini dapat dilakukan apabila kita memaknai tubuh bukan seperti kaum realis memahami tubuh, di mana tubuh dipandang secara objektif, namun tubuh harus dipahami sebagai sebuah keberadaan diri kita dalam dunia karena tubuh merupakan sebuah eksistensi. Eksistensi berarti ada

dalam dunia. Tubuh sebuah eksistensi dapat dimungkinkan karena tubuh sudah familiar dengan dunia.

*“My act of perception...takes advantage of work already done, of a general synthesis constituted for all: and this is what I mean when I say that I perceive with my body or my senses, since my body and my sense are precisely this familiarity with the world born of habit, that implicit or sedimentary body of knowledge”* .(Baldwin,2007:4)

Bagi Ponty pengalaman subjek itu bersifat ambigu dan terbatas, untuk memperjelas ambiguitas dan memperluas keterbatasan tersebut, maka tubuh lah yang dapat mengungkapkan dunia kepada kita tanpa ambigu dan tak terbatas. Oleh karena itu, tubuh bagi Ponty tidak meruang dan tidak mewaktu. Bagi Dia, melalui tubuh lah ruang dan waktu itu menjadi mungkin.

### 2.3. Subjek Paradoks

Perjalanan makna subjek dari Cartesian sampai ke Husserl tidak dapat terlepas dari persoalan hubungan subjek dan dunia/objek. Descartes mengandaikan adanya subjek yang rasional, artinya subjek dapat berdiri sendiri tanpa adanya dunia atau objek. Hal ini melahirkan konsep dualisme antara subjek dan objek. Dualisme ini dicoba disatukan oleh Kant dengan konsep subjek transendental, di mana Kant mengakui dunia memberikan pengaruh terhadap kesadaran subjek. Akan tetapi, akhirnya, Kant mempercayai bahwa yang *a priori* lah yang merupakan realitas yang sebenarnya. Husserl melihat dari sudut pandang yang lain tentang subjek dengan menambahkan variabel intensional, subjek yang terarah kepada objek. Namun, Husserl juga pada akhirnya jatuh pada intensional transendental dengan metode *epoche* dalam mencari realitas sebenarnya. Pengandaian subjek, baik itu dari Descartes maupun Kant dan Husserl ingin menunjukkan kepada kita bagaimana hubungan subjek dengan objek. Hubungan yang mereka utarakan terjebak pada keterpisahan subjek dengan objek, dengan

sama-sama mengasumsikan bahwa subjek dapat menangkap objek secara utuh dengan cara subjek memisahkan diri terhadap objek itu sendiri, agar subjek dapat melihat dengan jelas objek tersebut.

David Carr dalam bukunya *Paradox of Subjectivity: the self transcendental tradition* menjelaskan bahwa subjek transendental menjadikan subjek tidak dapat menjadi objek, Husserl mengatakan dengan istilah “*indeclinable*” yang artinya adalah yang tidak dapat berubah bentuk. Sedangkan Kant mengatakan bahwa subjek yang ada dengan kategori – kategori tidak dapat memikirkan bagaimana mendapatkan kategori-kategori sebuah konsep dirinya sebagai objek yang ada dengan kategori-kategori “*the subject of the categories cannot by thinking the categories acquire a concept of itself as an object of the categories*”.(Carr, 1999: 117)

Hal yang terlupakan oleh subjek transendental adalah ketika subjek itu melihat objek, dia lupa bahwa secara bersamaan subjek itu merupakan bagian dari objek itu sendiri (sesuatu yang dapat diamati). Artinya subjek itu bisa menjadi objek, ketika saya menjadi sebuah objek diri saya sendiri, artinya hanya sebagai saya untuk orang lain, atau bahkan yang saya sadari tentang diri saya sendiri hanya dalam bentuk *the Other* menyadari saya. (Carr, 1999: 116).

Persoalan tentang bagaimana menjelaskan subjek mengamati dirinya sendiri dapat dibayangkan seperti subjek itu bagaikan bingkai dan sekaligus sebagai pengamat yang mengamati isi bingkai itu. Ketika subjek ingin menemukan dirinya dalam isi bingkai itu, subjek tidak dapat menemukan dirinya karena dia berada diluar sebagai orang yang melihat bingkai itu sudah terkandung dalam bingkai itu sendiri.

“ *The subject is the frame / from / horizon of his world and part of the enframe content (of the reality he observes), and the problem is that he can not see / locate himself within his own frame: since all there is already within the frame, the frame as such is invisible.*”  
(Gabriel&Zizek,2009:108)

Ketika subjek itu dipahami sebagai bingkai, hal ini dapat dianalogikan dengan kita hidup dalam kehidupan yang terbatas. Ketika kita berada dalam keterbatasan itu, kita tidak dapat melangkah keluar dari keterbatasan dan melihat keterbatasan tersebut. Ketika kita mengaktualisasikan diri dalam kehidupan, bukan berarti kita akan mengetahui keterbatasan itu, namun hanya berada dalam kemungkinan-kemungkinan karena kehidupan itu terus bergerak dan memunculkan kemungkinan-kemungkinan bagi kehidupan berikutnya. (Gabriel&Zizek,2009:109)

Paradoks ini juga terlihat dalam persoalan aktifitas kesadaran subjek dalam mengamati sesuatu yang ada di luarnya. Dalam konsep apersepsi transendentalnya, Kant mengasumsikan bahwa kesadaran diri selalu mengikuti aktivitas kesadaran. Artinya, ketika saya sadar akan sesuatu, saya secara nyata sadar bahwa saya sedang menyadari sesuatu tersebut. Akan tetapi, dalam pembuktian secara empiris, fakta bahwa saya dapat menyadari kesadaran saya sendiri itu tidak dapat dibuktikan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka banyak yang mengklaim bahwa setiap aktivitas kesadaran yang dilakukan oleh subjek berpotensi untuk diberikan kesadaran tentang dirinya. “Jika saya ingin, saya dapat mengalihkan perhatian saya ke apa yang sedang saya lakukan”. Namun, solusi ini tidaklah cukup untuk menjelaskan aktifitas kesadaran tersebut karena dengan mengartikan sebagai subjek yang berpotensi untuk diberikan kesadaran tentang dirinya menandakan aktifitas kesadaran tersebut tidak efektif, hanya dapat berlaku pada beberapa point saja. (Gabriel&Zizek,2009:109)

Untuk menjawab dilema di atas, *Deleuzian* menawarkan konsep tentang “virtualitas” yang dipahami sebagai aktualitas yang mungkin sebagai entitas paradoks kemungkinan memproduksi pengalaman yang mempunyai efek sebenarnya. Namun, pandangan ini mengandung kerancuan karena ketidakmungkinan tindak kesadaran mencapai efek sebenarnya seperti dunia real yang dipahami oleh *Lacanian* dari media buatan atau objek empiris. (Gabriel&Zizek,2009:109) Yang mungkin dicapai itu adalah virtualitas simbolik. Maksudnya, tindak kesadaran tidak sepenuhnya mewujudkan efek sebenarnya. Oleh karena itu, kesadaran diri dipahami sebagai aktualitas yang selalu bersifat

mungkin. Akibatnya, subjek tidak dapat mengakses hal yang substansi dalam dirinya.

*“...self – awareness is as it were the actuality of its own possibility. Consequently, what ‘haunts’ an subject is his inaccessible noumenal self, the ‘thing that thinks, ‘an object in which the subject would fully ‘encounter himself’. (Gabriel&Zizek, 2009:110)*

Tesis ketidakmampu-teraksesnya dimensi substansi dari diri subjek menunjukkan bahwa setiap objek menampilkan aspek pengalaman fenomenalnya, tetapi subjek dalam menyadari dirinya tidak dapat menangkap pengalaman fenomenal tentang dirinya karena subjek itu berurusan dengan dirinya sendiri. Hal ini menandakan keunikan subjek, yaitu menjadikan pengalaman diri yang bersifat fenomenal dalam identitas nomena subjek sebagai sebuah benda. Dengan keunikan subjek tersebut, subjek tidak dapat mengobjektifkan dirinya seperti benda-benda yang ada di luar subjek, karena subjek adalah “*singular and is the universal frame of his world. Every content he perceive is his own*”. (Gabriel&Zizek, 2009:110) Subjek mengamati realitas dari posisi di luar realitas dan sekaligus bagian dari realitas tersebut, tanpa mampu mencapai sebuah pandangan objektif dari realitas dirinya sendiri yang ada di dalam.

## **BAB 3**

### **DEMOKRASI DAN SUBJEK POLITIK**

Setelah penulis membahas persoalan subjek yang mengantarkan kepada pemahaman tentang subjek paradoks pada Bab 2, pada Bab 3 ini penulis berupaya menjelaskan perkembangan demokrasi dan subjek politik.

Pada Bab ini, akan dibahas mengenai apa itu demokrasi yang terbagi ke dalam demokrasi liberal. Penulis memfokuskan diri membahas demokrasi liberal dan subjek politik sebagai politik konsensus. Akhirnya, penulis merentangkan telaah mengenai hubungan antara demokrasi liberal dan subjek liberal sebagai politik konsensus dengan demokrasi pluralisme dan subjek antagonis sebagai politik disensus.

Dengan pembahasan ini diharapkan akan terdapat kepehaman yang utuh mengenai apa yang penulis maksud sebagai demokrasi pluralisme dalam tulisan ini. Hal ini diperlukan guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai subjek paradoks dalam demokrasi pluralisme Chantal Mouffe yang akan dibahas pada bab 4.

#### **3.1. Demokrasi Liberal dan Subjek Politik Sebagai Politik Konsensus**

##### **3.1.1. Demokrasi Liberal**

Demokrasi liberal tidak dapat terlepas dari keterkaitan antara tradisi demokrasi dan wacana liberal yang melahirkan doktrin tentang kebebasan individu dan kedaulatan masyarakat. Kedaulatan masyarakat muncul karena demokrasi menuntut tiga dimensi, yaitu pertama adalah kedaulatan *populis*. Dimensi ini menuntut adanya kesetaraan politik. Hal ini menuntut rakyat dan bukan pejabat publik yang berdaulat. Yang kedua adalah kesetaraan warga negara. Dimensi ini menuntut setiap warga negara dipandang sebagai subjek hukum yang setara dalam melibatkan diri secara politis yang berarti

partisipasi aktif. Yang ketiga adalah diskursus demokrasi yang artinya adalah setiap individu harus memposisikan dirinya sebagai individu yang bebas.(Adian,2006:5-6)

Demokrasi dan liberalisme, meskipun berkaitan erat, sebenarnya merupakan konsep-konsep yang terpisah. Liberalisme politik dapat didefinisikan sebagai suatu aturan hukum yang mengakui hak-hak individu atau kebebasan dari kontrol pemerintah. (Fukuyama, 2004:73)

Liberalisme dibangun berdasarkan empat gagasan pokok, yaitu *individualisme normatif*, *universalisme*, *meliorisme* dan *egalitarianisme*. *Individualisme normatif* adalah gagasan yang beranggapan bahwa setiap kehidupan individual manusia mempunyai nilai asasi sehingga hak-hak individual selalu mengalahkan kelembagaan atau hak-hak kolektif. Akibatnya adalah keyakinan akan otonomi kreatif manusia sebagai satu-satunya penentu asasi kehidupannya sendiri. ( Danujaya,2012:154)

*Universalisme* adalah gagasan mengenai adanya hak dan kewajiban yang sama dari segenap manusia tanpa membedakan warisan budaya maupun lingkungan sejarah. Sedangkan *meliorisme* adalah pandangan bahwa dengan kreativitas individu manusia dan penggunaan rasionalitas secara kritis dan bijak mampu menyempurnakan kekurangan lembaga yang mereka ciptakan. Artinya, selalu terbukanya ruang penyempurnaan. *Egalitarianisme* adalah pandangan bahwa manusia sebagai individu merupakan satu-satunya pemegang hak-hak asasi dalam kehidupan ini. ( Danujaya,2012:154)

Berdasarkan gagasan utama dari liberalisme ini, demokrasi liberal berbicara tentang batas-batas kuasa negara. Hak-hak negara mencakupi, tapi tidak mengatasi hak-hak individual warganya, karena legitimasi politik negara selalu berlandaskan dari hak-hak individual. ( Danujaya,2012:157)

Demokrasi liberal juga berbicara tentang pembatasan fungsi negara. Artinya, peran negara bersifat minimum karena cuma sebatas mengamankan keadilan segenap warga negaranya, baik itu dalam artian melindungi pemenuhan hak-haknya, maupun dengan mengatur relasi sosial di antara mereka. Namun, tidak secara langsung mencampuri urusan warganya.( Danujaya,2012:158)

Dengan memberikan batas kuasa dan fungsi kepada negara, pada dasarnya demokrasi liberal ingin menciptakan sebuah doktrin tentang netralitas negara. ( Danujaya,2012:161) Artinya, negara netral dalam menentukan konsep – konsep tentang kehidupan yang baik dari para warga negara. Contohnya, negara tidak boleh mengutamakan agama atau kepercayaan, haluan politik, maupun konsepsi nilai tertentu bagi masyarakat. Netralitas negara pada dasarnya ingin mencoba memisahkan antara ruang publik dan ruang private. Ruang publik dipahami sebagai ruang dimana warga negara berkegiatan yang bisa berpengaruh pada perwujudan terbentuknya relasi – relasi sosial yang adil termasuk dalam lingkup politik. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang private adalah warga negara berkegiatan yang secara tak nyata dan langsung berpengaruh pada perwujudan relasi sosial yang adil. (Danujaya, 2012: 162)

### 3.1.2. Subjek Demokrasi Liberal

Untuk memahami subjek demokrasi liberal tidak bisa melepaskan diri dari konsep individualisme yang didasari oleh pengakuan atas hak-hak individu dan netralitas negara yang merupakan keterpisahan antara ruang publik dan ruang private. Keterpisahan antara ruang publik dan ruang private ini merupakan penekanan liberal mengenai pengutamaan yang hak diatas yang baik. Hak disini diartikan sebagai yang benar secara hukum seperti aturan mengenai relasi sosial yang adil. Sedangkan yang baik selalu berkaitan dengan nilai tertentu. (Danujaya, 2012: 162)

Dengan mengutamakan hak, artinya negara harus menjamin setiap hak-hak individu atas subjek politik yang plural. Subjek politik yang plural ini disebabkan atas keyakinan terhadap kapasitas yang bebas dari setiap masing-masing individu berarti mengakui perbedaan dari setiap individu. Dengan adanya perbedaan setiap individu maka setiap individu akan menuntut bagaimana hak masing-masing mereka dapat terpenuhi.

Persoalan hak sangatlah penting dalam menentukan subjek liberal karena persoalan hak akan menjelaskan bagaimana subjek politik liberal berelasi antara sesamanya, dan bagaimana politik liberal dapat mengakomodasi hak-hak individu tersebut agar tercapai kesejahteraan umum.

Bagi utilitarianisme hak diartikan sebagai hak atas bagaimana mendapatkan kebahagiaan maksimal. Utilitarianisme lebih mementingkan hak orang banyak dari pada hak yang sedikit. Contohnya ketika ada seorang teroris yang diketahui memasang bom yang dapat membahayakan jiwa ribuan orang. Jika dia menolak memberikan informasi dimana letak bom itu, apakah dia boleh di siksa, hingga akhirnya membuka rahasianya?. Utilitarianisme akan menjawab bahwa hak teroris untuk tidak berkonflik dengan hak ribuan orang yang harus diselamatkan, oleh karena itu si teroris harus disiksa demi menyelamatkan hak ribuan orang tersebut. (Bertens, 2007: 191)

Berbeda dengan utilitarianisme, Rawls mengatakan bahwa hak tidak harus tergantung kepada utilitarianisme. Alasannya adalah apa yang di justifikasikan sebagai hak adalah tidak hanya tentang memaksimalkan kesejahteraan umum, tetapi tentang bagaimana individu mempertahankan keinginannya untuk mencapai prioritasnya dalam kesejahteraan umum tersebut. (Mouffe, 1993: 26). Untuk mempertahankan itu Rawls menawarkan konsep keadilan yang bertujuan agar setiap individu dapat merasakan keadilan dalam mengakomodasi hak-haknya.

Konsep keadilan yang dibangun dalam doktrin *reasonable*. *Reasonable* adalah “*general good as such but desire for its own sake a social world in which they, as free and equal, can cooperate with others on terms all can accept*”. *Reasonable* dipahami sebagai nalar yang dapat mewujudkan keadilan yang *fair* bagi semua orang. (Rawls, 1996: 50)

Konsep keadilan Rawls dibangun di atas dua prinsip. Pertama, *principle of equal liberty*. Prinsip ini menekankan pada kebebasan yang melebihi nilai-nilai yang lain. Kebebasan adalah sesuatu yang tak dapat dikorbankan kecuali untuk kebebasan itu sendiri. Kebebasan dimiliki sama oleh semua orang. Yang kedua adalah prinsip perbedaan atau *difference*

*principle*, yaitu prinsip yang mengatur agar ketidaksamaan yang ada memberikan keuntungan untuk semua orang.( Danujaya,2012:172)

Kedua prinsip ini membawa kepada pemahaman bahwa Rawls ingin menciptakan negara yang teratur di dalam masyarakat yang pluralis. Untuk membangun negara yang teratur ini, hanya dapat diciptakan oleh individu-individu atau subjek yang sadar dan memiliki tujuan dalam dirinya. Subjek bertindak untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu berdasarkan kepercayaan yang dimilikinya, tentang apa yang harus dimiliki, atau yang ingin dicapai atau subjek yang berada dalam posisi asali. (Rawls,1996: 24) Subjek yang berada pada posisi asali dicirikan oleh tidak memiliki informasi khusus tentang kedudukan dalam masyarakat, posisi ekonomi, status sosial, bakat, kemampuan dan ciri-ciri psikologis. Namun subjek tahu tentang informasi umum kehidupan sosial. ( Rawls, 1971: 118)

Tidak tahunya subjek pada posisi asali tentang informasi khusus merupakan sebuah bentuk kondisi subjek dalam posisi asali yang diselubungkan pada ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*).

Selubung ketidaktahuan adalah kondisi alamiah orang yang berada dalam posisi asali dan kondisi ini harus mengabaikan segala kelebihan, ambisi dan kepentingan diri dan kelompokannya dalam menghasilkan prinsip-prinsip keadilan. Selubung ketidaktahuan berguna untuk mengamati salah satu orang atau lebih dapat mencapai posisi yang lebih baik, dan dapat mensimulasikan pertimbangan situasi hipotetis. Karena dalam konsep keadilan harus diyakini bahwa keadilan itu berbicara tentang alternatif-alternatif yang dapat membuat seseorang itu hidup dengan sejahtera dan bagaimana seseorang itu mampu mencapai kepuasan di atas kondisi yang penuh kendala-kendala. ( Rawls, 1971: 119).

Membatasi posisi asali dalam selubung ketidaktahuan merupakan sebuah tindakan yang sangat penting dalam mencapai keadilan. Karena pada dasarnya selubung ketidaktahuan itu individu memiliki banyak informasi yang sangat khusus. Selubung ketidaktahuan ini memungkinkan putusan bulat dari konsep tertentu tentang keadilan. Tanpa ada selubung ketidaktahuan ini maka keadilan itu mungkin saja tidak bisa tercapai. Ketika

posisi asali dibiarkan dengan informasi khusus, maka akan terjadi kebiasaan oleh kontengensi kesewenang-wenangan, karena setiap orang pasti ingin keuntungan. Selubung ketidaktahuan membuat setiap individu cukup berada dan diperlakukan sama sebagai pribadi yang bermoral. (Rawls, 1971: 121)

Putusan individu cukup berada dalam kondisi sebagai pribadi yang bermoral dikarenakan setiap individu mempunyai rasionalitas. (Rawls,1996: 27) Rasionalitas adalah

*“ a distinct idea from the reasonable and applies to a single, unified agent (either an individual or corporate person) with the power of judgment and deliberation in seeking ends and interests peculiarly its own. The rasional applies to how these ends and interests are adopted and affirmed, as well as to how they are given priority.”*  
(Rawls,1996: 50)

Dari pengertian ini dipahami bahwa setiap masyarakat mempunyai konsep tentang yang baik.

Orang yang berada pada posisi asali terikat dalam satu kontrak untuk menetapkan konsep keadilan dan prosedur yang adil dalam satu kerja sama sosial. Dalam selubung ketidaktahuan, setiap orang yang ada pada posisi asali hanya berpikir apa yang terbaik untuk dirinya, sesuai dengan apa yang juga diperkirakan oleh orang lain terhadap diri mereka masing-masing, sehingga kesepakatan yang dihasilkan akan *fair* bagi semua ( *justice of fairness*). (Rawls,1996: 28)

Metode posisi asali Rawls tidak dapat dipungkiri terpengaruh pemikiran Kant, di mana Kant menawarkan adanya otonomi rasional. Otonomi rasionalnya Kant diterangkan dalam konsep *apersepsi* transendental. Dalam konsep *apersepsi* transendental menandakan bahwa manusia dapat mencapai pengetahuan yang bersifat *a priori* di mana pengetahuan itu terlepas dari pengalaman-pengalaman yang datang silih berganti dan dapat mempengaruhi putusan.

Dengan adanya otonomi rasional ini, keberalannya tentang apa yang baik secara umum atau *reasonable* dapat dijelaskan. Hal itu dimungkinkan karena otonomi rasional dapat mengandaikan setiap individu berada dalam posisi asali yang terselubung dalam kondisi ketidaktahuan. Individu yang berada dalam posisi asali ini mampu mengabaikan segala kelebihan, ambisi dan segala kepentingan yang dapat merusak keputusan tentang sesuatu yang berakibatkan ketidakadilan.

*Reasonable* dan rasionalitas yang ditawarkan Rawls bertujuan agar individu yang bersih dari prasangka yang disembunyikan dalam selubung ketidaktahuan mungkin bisa efektif mewujudkan konsepsi masing-masing tentang kebaikan, namun, ia juga mengatakan bahwa sebuah masyarakat yang dibentuk untuk mewujudkan ini diinginkan dalam arti yang lebih luas, yakni bahwa masyarakat itu sesuai dengan penilaian terbaik tentang apa yang optimal dari segi relasi sosial. Jadi Rawls merumuskan bahwa masyarakat yang adil adalah sebuah penghimpunan sosial dari berbagai himpunan sosial, yang meliputi keluarga, persahabatan dan perkumpulan yang lebih besar. (Rawls, 1971: 496).

Rumusan masyarakat yang adil itu yang didasari oleh *Reasonable* dan rasional itu ternyata bermasalah ketika berhadapan dengan masyarakat yang hidup dalam doktrin-doktrin religius, filsafat dan moral pokok yang berkemungkinan bertahan dalam masyarakat tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, Rawls menawarkan konsep konsensus yang bertumpang tindih. (Mouffe, 2000:28)

Konsensus yang bertumpang tindih dapat dipahami bukan berlandaskan kesepakatan langsung dan seksama. Kesepakatan bukanlah berarti segenap pihak sepakat karena memiliki pendirian, pemikiran atau sikap yang sama terhadap sesuatu, tetapi secara nalar saling bertoleransi untuk memahami dan menerima kesepakatan yang diputuskan bersama oleh sesama yang bernalar. ( Danujaya,2012:167) Artinya, Rawls menyediakan ruang toleransi untuk memahami dan menerima dan ruang adaptasi untuk menyesuaikan diri dalam kerangka kemajemukan.

Selain dari konsep keadilan Rawls, Habermas pun muncul dalam menjawab tantangan pluralitas masyarakat dalam kerangka demokrasi liberal. Habermas menawarkan konsep tindakan komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat komunikatif atau masyarakat demokrasi bebas dominasi. Konsensus terjadi jika tindakan komunikatif tidak lagi terdistorsi dan bebas dari dominasi.

Untuk menciptakan masyarakat yang komunikatif ini, Habermas mengandaikan bahwa setiap subjek itu memiliki akses istimewa dan dapat mengekspresikan pengalaman dirinya sendiri sebelum ke publik. Hal ini tepatnya di dalam sikap-sikap ekspresif di mana subjek mengetahui dirinya sendiri tidak hanya sebagai subjektivitas tetapi juga sebagai sesuatu yang selalu siap membuat ikatan yang semata-mata subjektif dalam pengenalan, bahasa, dan interaksi timbal balik.

Di dalam komunikasi, para partisipan ingin membuat lawan bicaranya memahami maksud dengan berusaha mencapai “klaim” validitas. Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa pemaksaan sebagai hasil konsensus. (Hardiman, 1993:xxvi)

### 3.2. Demokrasi Pluralisme Sebagai Politik Disensus

Untuk memahami demokrasi pluralisme sebagai politik disensus, penulis akan menjelaskan bagaimana demokrasi pluralisme itu terbentuk yang akhirnya berdampak pada politik disensus.

Dalam memahami demokrasi pluralisme ini, penulis akan menjelaskan bagaimana relasi subjek politik dalam wilayah demokrasi yang diawali dengan subjek yang antagonistik. Subjek yang antagonistik ini akan membantu pembaca dalam memahami subjek yang agonistik sebagai landasan utama dari konsep demokrasi pluralisme Chantal Mouffe.

#### 3.2.1. Subjek Antagonistik Sebagai Kritik Politik Konsensus

Berdasarkan apa yang telah diterangkan tentang demokrasi liberal dalam wadah politik konsensus yang berdasarkan kondisi pluralitas masyarakat, baik menurut Rawls maupun Habermas pada sub bab diatas. Pada dasarnya, mereka mencoba menghilangkan perbedaan dengan rasionalitas moral kolektif, sehingga secara tidak langsung mengeliminasi bagian-bagian yang tidak sama. Hal itu dapat dilihat secara jelas ketika dikatakan bahwa adanya masyarakat yang baik berdasarkan kesepakatan moral kolektif, maka akan menghilangkan masyarakat yang buruk. Contohnya, ketika laki-laki yang menyukai perempuan sebagai rasionalitas moral kolektif, maka bagi laki-laki yang menyukai sesama jenis merupakan sesuatu yang di luar moral kolektif itu.

Politik konsensus ini tidaklah menjawab kondisi pluralitas masyarakat, di mana masyarakat itu merupakan individu yang bebas dan setara, dengan terjadinya pengeliminasian yang berdasarkan rasionalitas kolektif.

Schmitt juga mengkritik bahwa politik konsensus yang mengatasnamakan kesetaraan sebagai prinsip dasar dari negara liberal bukanlah sebuah politik. Menurut dia, politik tidak hanya membicarakan soal kesetaraan saja, tetapi juga harus membicarakan ketidaksetaraan.

Berangkat dari pengakuan bahwa pluralitas masyarakat yang tak terjembatani, Carl Schmitt mencoba memaknai ulang konsep politik demokrasi. Menurut Schmitt, politik demokrasi bertujuan untuk membangun "kami". Untuk membangun "kami" maka harus dibedakan dengan "mereka". Maka politik demokrasi akan selalu membuat sebuah pembatasan antara "kami" dan "mereka". Schmitt membahasakan "mereka" dengan istilah *enemy* yang selalu ada di luar konstitutif dan bersifat antagonistik. (Mouffe,1993:144)

Hubungan "kami" dan "mereka" dapat dilihat dalam sebuah *demos* atau ruang kolektif, dalam *demos* hubungan keduanya akan selalu terjadi ketegangan karena "mereka" ingin menjadi "kami" dan "kami" akan selalu mengecualikan "mereka". Untuk menghadapi ketegangan ini, hubungan antara "kami" dan "mereka" tidak bisa direduksi dengan sebuah dialektika

negasi. Antara “kami” dan “mereka” tidak bisa dibandingkan karena “kami” tidak akan ada kalau tidak ada “mereka”.

Dengan pandangan terhadap adanya hubungan “kami” dan “mereka” yang tidak dapat disatukan, Schmitt mendefenisikan ulang politik. Menurut dia, politik bukanlah membahas tentang bagaimana sebuah negara mengatur masyarakat dan bagaimana mencapai kekuasaan, tetapi lebih melihat relasi antara subjek politik, yaitu relasi “lawan” dan “kawan”. Relasi “lawan” dan “kawan” ini bersifat antagonistik.

Bagi Schmitt, politik selalu ada hubungannya dengan konflik dan antagonisme. Oleh karena itu, pemahaman ini berada di luar rasionalisme liberal karena selalu menunjukkan batas-batas dari setiap konsensus rasional dan mengungkapkan bahwa konsensus selalu didasarkan pada tindakan eksklusif. Kepercayaan liberal pada kepentingan umum sebagai produk yang bebas dari kepentingan pribadi dan bahwa konsensus rasional yang universal membuat liberalisme buta terhadap fenomena politik. Fenomena yang dapat dipahami hanya dalam konteks kemungkinan yang hadir dari hubungan “lawan” dan “kawan”, terlepas dari aspek yang kemungkinan implikasinya terhadap moralitas, estetika, dan ekonomi. (Mouffe,1993:144)

Untuk memahami hubungan antagonistik ini, maka kita harus menerima identitas setiap relasional. Artinya menerima “*the Other*” sebagai penegasan dari perbedaan. *The Other* dipahami sebagai sesuatu yang mengonstitutif keberadaan kita dari luar sana (*constitutive outside*). *Constitutive outside* bukanlah mengacu pada oposisi konstitutif atas sesosok “aku” atau “kami” yang konkret, melainkan mengacu pada sesuatu yang mengkondisikan kemunculan aku atau kami dengan mengandaikan kehadiran aku atau kami lewat kesadaran akan kehadiran *the Other* yang muncul serentak disebatang sana. Mouffe mengatakan dalam bukunya

*“This is what is involved in the Derridean notion of the ‘constitutive outside’ : not a content which would be asserted/negated by another content which would just be its dialectical opposite – which would*

*be the “if we were simply saying that there is no ‘us’ without a ‘them’ – but a content which, by showing the radical undecidability of the tension of its constitution, makes its very positivity a function of the symbol of something exceeding it: the possibility/impossibility of positivity as such”.* (Mouffe,2000:12)

Dengan menerima kehadiran *the Other*, maka dapat dipahami bahwa subjek dibentuk lewat pemilihan perbedaan dari *the Other*. Lewat keterpilahan perbedaan kami dari *the Other* maka kami ada. Bagi Levinas, keterpilahan ini mengakibatkan keterpisahan yang absolut karena kami sebagai *the Other* membuat *the Other* tidak akan mungkin terlebur dalam kami karena *the Other* tidak pernah sama dengan kami. Hal ini membuat *the Other* tidak pernah tereduksikan menjadi kami sehingga *the Other* akan senantiasa menjadi limit keterhubungan. (Danujaya,2012:240) Oleh karena itu, asumsi dari keutuhan dalam politik demokrasi itu tidak mungkin.

### 3.2.2. Pluralisme Agonistik : Sebuah Kontingensi Relasi Antagonis

Konsep agonistik diperkenalkan oleh Chantal Mouffe. Menurut dia persoalan mendasar politik demokrasi pluralis adalah bagaimana melembagakan watak antagonistik dari politikal, namun bukan dalam arti sama sekali menyingkirkan, apalagi menumpas habis relasi antagonis, melainkan sekedar menjinakkan sehingga tidak berkembang menjadi liar.(Danujaya,2012:279)

Mouffe menyebutkan politik demokrasi pluralis menerima relasi antagonis yang terkoriidor dalam idealitas demokrasi sebagai pluralisme agonistik.(Mouffe,2000:101) pluralisme agonistik secara harfiah dapat diartikan sebagai politik keragaman yang harus terus-menerus memperjuangkan persatuan dalam keragamannya. Mouffe merumuskan tujuan politik demokrasi dalam kerangka pluralisme agonistik sebagai berikut :

*“ Envisaged from the point of view’agonistic pliralism’, the aim of democratic politics is to construct the ‘ them’ in such a way that it is no longer perceived as an enemy to be destroyed. But as an ‘adversary’, that is somebody whose ideas we combat but whose right to defend those we do not put into question”.*  
(Mouffe,2000:102)

Untuk menjelaskan perbedaan konseptual dari pengakuan atas keniscayaan relasi antagonis pada pluralisme agonistis, Mouffe membuat perbedaan makna seteru atau *adversary* dari lawan atau *enemy*. Seteru adalah suatu lawan, tetapi juga lawan yang terlegitimasi. Satu dengan kita yang memiliki kesamaan karena kita sama – sama berbagi perekat prinsip – prinsip etiko-politis dari demokrasi liberal, yakni kebebasan dan kesetaraan.

*” Adversary is an enemy, but a legitimate enemy, one with whom we have some common ground because we have a shared adhesion to the ethico-politikal principles of liberal democracy”*  
(Mouffe,2000:102)

Pluralisme agonistis juga tidak mengenal jalan keluar yang bersifat langgeng. Dalam proses pelebagaan relasi antagonis, pertarungan konflik agonistik pada dasarnya menyangkut perselisihan antara yang menghegemoni yang saling bertentangan. Artinya, adanya kecenderungan untuk menyingkirkan lawan politik, meskipun harus selalu berada dalam koridor demokrasi. Untuk menyelesaikan penyingkiran antar lawan politik, maka dilakukan dengan cara politikal. Artinya, diselesaikan secara politis lewat pertarungan kekuatan, lewat percaturan relasi – relasi kuasa. Oleh karena itu, menurut Mouffe, walaupun kompromi politik bukanlah tidak mungkin terjadi, namun harus disadari sebagai jalan keluar sementara dalam lintasan pertikaian politikal yang akan berkelanjutan dan tidak berkesudahan.  
(Mouffe,2000:102)

Dalam proses pelembagaan relasi antagonis menjadi relasi agonis, selalu mengandung paradoksal, antara dapat dikompromikan dengan pertikaian yang berkelanjutan. Mouffe secara paradoks merumuskan hubungan seteru dengan menempatkan lawan yang berteman (*friendly enemy*), seperti yang dia ungkapkan :

*"This is why I propose to distinguish between two forms of antagonism. Antagonism proper – which takes place between enemies. That is, person who have no common symbolic space – and what I call 'agonism'. Which is a different mode of manifestation of antagonism because it involves a relation not between enemies but between 'adversaries'. Adversaries being defined in a paradoxical way as 'friendly enemies'. That is, person who are friends because they share a common symbolic space in a different way."*  
(Mouffe,2000:3)

Seteru adalah seorang teman karena berbagi ruang simbolik yang sama, namun disisi lain juga seorang lawan karena ingin mengelola ruang simbolik tersebut dengan cara mereka sendiri. Dengan adanya istilah ruang simbolik inilah yang membedakan antara relasi antagonis dengan relasi agonis yang tidak menghilangkan atau melenyapkan relasi antagonis itu sendiri. Ruang simbolik dipahami sebagai sesuatu yang melibatkan berbagai praktek material, ritual, dan lembaga.

**BAB 4**  
**SUBJEK PARADOKS DALAM DEMOKRASI PLURALISME**  
**CHANTAL MOUFFE**

Untuk memahami subjek paradoks dalam demokrasi pluralisme menurut Chantal Mouffe, tidak bisa terlepas dari perjalanan argumentasi antropologisnya. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah mengapa demokrasi pluralisme hanya dapat diasumsikan kepada subjek yang paradoks? Mengapa tidak subjek Cartesian ataupun Kantian? Hal ini lah yang akan dibahas dalam bab ini.

4.1. Subjek Modern Sebagai Asumsi yang Membangun Demokrasi Liberal

Subjek Cartesian merupakan awal dari subjek modern, subjek yang berdasarkan rasionalitas. Rasionalitas dalam Cartesian yang berpusat pada 'aku yang berpikir' adalah aku yang melepaskan segenap keterlibatanku dengan dunia. Artinya, Cartesian mencoba melepaskan subjek dari pengaruh kolektif dengan tujuan untuk menciptakan subjek yang mampu memikirkan dirinya sendiri. Konsekuensi dari 'aku yang berpikir' ini adalah subjek yang otonom.

Otonomi subjek membentuk identitas modern, yaitu kebebasan individu. Kebebasan dapat terjadi apabila subjek itu dapat menentukan pilihan dan tujuannya sendiri berdasarkan rasionalitas yang independen.

Kebebasan individu menjadi prinsip dasar dari demokrasi liberal. Liberalisme dibangun berdasarkan empat gagasan pokok, yaitu *individualisme normatif*, *universalisme*, *meliorisme*, dan *egalitarianisme*. *Individualisme normatif* menfokuskan diri tentang bagaimana pentingnya nilai asasi setiap indiviu, artinya hak-hak individu lebih utama dari pada hak-hak kolektif. Dengan lebih mengutamakan hak-hak individu, akibatnya adalah keyakinan akan otonomi kreatif manusia sebagai satu-satunya penentu asasi kehidupannya sendiri.

Untuk mengimbangi *individualisme normatif* dimunculkan konsep *universalisme* dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama tanpa

membedakan apa yang melatarbelakanginya. Dengan adanya pengakuan atas kreativitas setiap individu maka mereka mampu untuk menyempurnakan kekurangan yang mereka ciptakan, ini disebut dengan konsep meliorisme atau terbukanya ruang penyempurnaan. Sedangkan *Egalitarianisme* mengakui bahwa manusia sebagai individu merupakan satu-satunya pemegang hak-hak asasi dalam kehidupan ini. Berdasarkan empat prinsip ini dapat dilihat bahwa otonomi subjek sangatlah penting dari pada kolektif.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, demokrasi liberal telah mengalami artikulasi untuk menjawab tantangan pluralitas masyarakat dengan mencoba mereformulasikan makna demokrasi liberal tanpa menghilangkan sifat dasar dari demokrasi liberal tersebut. Tokoh yang sangat berjasa, yaitu Rawls dan Habermas. Mereka merumuskan sebuah konsep demokrasi yang berlandaskan politik konsensus agar terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

Politik konsensus Rawls dalam demokrasi liberal dituangkannya dalam konsep keadilan, sedangkan Habermas mencoba merumuskannya dalam tindakan komunikatif. Kedua prinsip ini tidaklah terlepas dari pengaruh dari subjek modern yang sangat mengagungkan rasionalitas. Rasionalitas yang mempengaruhi Rawls dan Habermas berbeda dengan konsep rasionalitas yang ditawarkan oleh Cartesian, Rawls dan Habermas mempercayai bahwa adanya hubungan intersubjektif, yang mengakibatkan bahwa kebebasan individu tidak ditentukan oleh dirinya saja, tetapi ada keterkaitan dengan kebebasan individu lain.

Prinsip dasar dari keadilan yang dikemukakan oleh Rawls adalah keadilan yang *fair* bagi semua orang atau *justice as fairness*. Prinsip ini ditopang oleh konsep *reasonable* yang mengandaikan adanya konsep yang baik bagi semua orang atau *general good* agar tercipta kerja sama yang *fair*. *Reasonable* tidak akan berarti kalau tidak ada rasionalitas. Rasionalitas berguna untuk memutuskan mana yang baik dari banyaknya kebaikan yang menyebar disekelilingnya.

Untuk membantu kerja rasionalitas, maka Rawls menggunakan metode posisi asali yang didasari oleh selubung ketidaktahuan agar keadilan yang dicapai bebas dari bias kepentingan individu, kepentingan kelompok atau segala hal yang dapat merusak keputusan tentang sesuatu yang berakibatkan ketidakadilan.

Metode posisi asali dalam selubung ketidaktahuan dengan memakai *reasonable* dan rasionalitas, pada dasarnya ingin mencapai individu yang otonom. metode ini tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pengaruh pemikiran Kant, di mana Kant menawarkan adanya otonomi rasional. Otonomi rasionalnya Kant diterangkan dalam konsep apersepsi transendental. Dalam konsep apersepsi transendental menandakan bahwa manusia dapat mencapai pengetahuan yang bersifat *a priori* dimana pengetahuan itu terlepas dari pengalaman-pengalaman yang datang silih berganti dan dapat mempengaruhi putusan.

Dengan adanya otonomi rasional ini, keberalasannya tentang apa yang baik secara umum atau *reasonable* dapat dijelaskan, karena dengan otonomi rasional dapat mengandaikan setiap individu berada dalam posisi asali yang terselubung dalam kondisi ketidaktahuan. Individu yang berada dalam posisi asali ini mampu mengabaikan segala kelebihan, ambisi, dan segala kepentingan yang dapat merusak keputusan tentang sesuatu yang berakibatkan ketidakadilan.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, posisi asali mengandaikan bahwa setiap individu mampu berada dalam kondisi yang otonom, yang hanya bekerja sesuai dengan prinsip – prinsip rasionalitas. Individu yang otonom ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Kant tentang subjek yang otonom, dimana subjek itu adalah syarat yang memungkinkan kepastian sekaligus kesatuan pengetahuan.

#### 4.2. Ketidakmemadainya Subjek Modern dalam Masyarakat Pluralis

Reformulasi demokrasi liberal yang dilakukan Rawls dan Habermas pada dasarnya mengakui sebuah masyarakat yang pluralis. Mereka mencoba mendamaikan antara kebebasan individu dengan keberagaman yang berpotensi saling bertabrakan dengan cara membuat politik konsensus.

Demi melanggengkan politik konsensus dalam menghadapi pluralitas masyarakat, Rawls mengatakan bahwa pentingnya menerima tiga fakta umum budaya politik masyarakat demokratis yang mau tak mau harus diterima masyarakat sebagai kenyataan yang tak dapat ditolak. Ketiga kenyataan budaya politik masyarakat demokratis itu adalah

*” pertama adalah bahwa keragaman dotrin-dotrin religius, filosofis dan moral komprehensif yang nalar yang dijumpai pada masyarakat-masyarakat demokratis modern bukanlah sekedar kondisi kesejarahan yang boleh jadi akan segera berlalu belaka, hal tersebut merupakan roman permanen dari budaya publik masyarakat demokrasi. Sebuah fakta umum yang kedua dan bertalian adalah bahwa sebuah keberbagian pemahaman yang bersinambungan atas sebuah dotrin religius, filosofis, dan moral komprehensif hanya dapat dipertahankan lewat penggunaan opresif kuasa hukum. Akhirnya sebuah fakta umum yang ketiga adalah bahwa sebuah rezim demokratis yang aman dan langgeng, yang tak terpecahkan ke dalam keyakinan-keyakinan doktrinal yang saling bertentangan dan kelas-kelas sosial yang bermusuhan, harus didukung secara sukarela dan bebas oleh sekurang-kurangnya sebuah mayoritas substansial para warganya yang aktif secara politik.”*

(Danujaya,2012:165-166)

Antara faktasitas pluralitas dan politik kosensus Rawls menjembatannya dengan metode posisi asali dalam selubung ketidaktahuan dengan membatasi subjek dari informasi-informasi khusus. Artinya Rawls mencoba melepaskan subjek dari faktisitas pluralitas tersebut. Dengan membatasi individu seperti itu, Rawls mengasumsikan bahwa setiap individu dapat melihat apa yang baik secara umum dengan *reasonable* dan rasionalitas individu tersebut. Hal ini tidak bisa terlepas dari konsep subjek yang soliter. Konsensus akan bisa terjadi apabila subjek politik mampu mengabaikan kepentingan-kepentingan individu yang dapat mengganggu kesepakatan dalam masyarakat.

Subjek politik yang soliter merupakan warisan dari subjek modern dimana keyakinan kolektif bukan ukuran kebenaran, melainkan dirinya sendiri berdasarkan diri yang berpikir sekaligus penentu dari kebenaran. Subjek yang seperti ini adalah subjek yang mampu berpikir tentang dirinya secara utuh. Subjek yang melepaskan dirinya dari dunia sekitarnya. Subjek yang menafikan *the other*.

Ketakterlibatan subjek dengan *the Other* berarti melepaskan diri dari ikatan kolektif. Ikatan kolektif pun tidak berbicara banyak dihadapan subjek modern. Subjek modern menentukan tujuan atau keinginannya sendiri. Tujuan dan keinginan merupakan hak yang tak bisa dicabut dari setiap individu. Sebagaimana yang dianut dalam prinsip demokrasi liberal dimana individu berhak menentukan nasibnya sendiri dan negara tidak boleh ikut campur di dalamnya, yang tercakup pada prinsip keterpisahan antara persoalan privat dan publik. Keterpisahan privat dan publik ini, pada dasarnya sengaja mengabaikan faktisitas pluralitas mesyarakat, seperti faktisitas bahwa masyarakat mempunyai keberagaman keyakinan beragama, keberagaman budaya, keberagaman ketertarikan seksualitas. Fakta seperti ini selalu di pisahkan dari persoalan publik, pada hal dalam kenyataannya persoalan privat tidak bisa dipisahkan dari persoalan publik. Contohnya di Prancis, pemerintahan Prancis melarang untuk memakai atribut agama seperti jilbab bagi umat Islam, salib bagi umat kristen. Seperti juga undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi, dalam undang-undang ini tak dapat dipungkiri bahwa ada unsur keyakinan umat beragama Islam akan tidak bolehnya membuka aurat dan menonton aksi yang mengubar aurat.

Persoalannya sekarang adalah mungkinkah subjek soliter itu terbentuk dalam faktisitas pluralisme. Kalau dilihat lebih dalam, subjek soliter adalah subjek yang utuh, subjek yang dapat mendefinisikan dirinya secara pasti, sebagaimana yang diwariskan oleh Cartesian maupun Kantian. Subjek soliter hanya mampu menyembunyikan persoalan faktisitas pluralitas. Seperti yang dilakukan Rawls dengan memposisikan manusia dalam selubung ketidaktahuan agar tercapai sebuah kesepakatan antar relasi sosial. Kondisi selubung ketidaktahuan ini pada dasarnya menyembunyikan kondisi ontologis dari masyarakat yang pluralis.

Untuk memahami bagaimana munculnya faktisitas pluralisme ini tidak bisa terlepas dari konsep subjek yang dikemukakan oleh Heidegger. Heidegger pada dasarnya menolak subjek soliter atau rasional yang ditawarkan oleh subjek modern. Heidegger mengatakan bahwa subjek itu adalah subjek yang terlibat dalam dunia. Bagi Heidegger, “aku” adalah dia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dunia.

Keterlibatan “aku” dalam dunia, Heidegger namakan dengan *dasein*. *Dasein* diartikan secara literal sebagai ‘*there-being*’ atau ‘*being-there*’, arti ini menunjukkan cara manusia ber-Ada. Dengan mengartikan sebagai ‘*being-there*’ menegaskan *Being* itu adalah ‘*Being-in-the-world*. ‘*Being-in-the-world*’ menunjukkan relasi internal manusia dengan dunia. (Mulhall,2005:40) *Dasein* ini dibangun dalam tiga karakter, yaitu faktisitas (situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia), pemahaman dan kejatuhan. Dengan adanya karakter faktisitas ini menunjukkan bahwa subjek itu ketika dia berada dalam sebuah dunia, dunia itu telah begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa subjek itu pada dasarnya tidak perlu meragukan keberadaannya karena ketika diberada dalam sebuah kondisi, kondisi itu telah bermakna, bukan suatu yang kosong yang harus dimaknai.

Konsekuensi dari pemikiran Heidegger ini adalah individu dalam lingkungan bukan lahir karena individu memberikan makna kepada lingkungan tersebut tetapi lingkunganlah yang membentuk individu tersebut. Contohnya ketika seorang anak lahir dia telah dilekatkan pada dirinya bahwa orang tuanya adalah orang Indonesia, si anak tidak bisa memilih orang tuanya adalah orang Amerika.

Subjek yang terlibat dalam dunia tidak bisa terlepas dari peran bahasa. Bahasa adalah tempat dimana subjek senantiasa berada di dalamnya, bukan tempat yang diciptakan oleh subjek. Persoalan bahasa ini, oleh Wittgenstein disebut sebagai permainan bahasa. Bahasa menurut dia adalah aturan main yang berbeda dari satu bentuk kehidupan ke bentuk kehidupan lainnya. Aturan main tersebut bukan merupakan hasil pilihan individu, melainkan aturan yang mana individu tertanam didalamnya. (Adian,2011: 117)

Faktisitas pluralitas diakibatkan oleh ketidaktereduksinya keberagaman subjek dalam sebuah keutuhan. Ketidaktereduksinya ini karena subjek itu selalu berada dalam kondisi yang tidak utuh. Ketidaktereduksinya subjek ditandai oleh subjek yang selalu berada dalam kondisi keserbakekurangan atau *lack*. Kondisi keserbakekurangan ini disebabkan oleh ada sesuatu yang tidak dapat diinkluskikan ke dalam diri subjek sehingga ia tidak pernah mencapai keutuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh Lacan dengan teori subjek. Bagi Lacan, subjek adalah sesuatu yang selalu berada dalam keserbakekurangan yang tidak pernah dapat mencapai

pemenuhan identitasnya sebagai sesuatu yang utuh. Subjek selalu kekurangan secara inheren dan kondisi ini terjadi karena ada ekses terhadap dirinya.

Ada dua jenis ketidakutuhan pada subjek. Pertama adalah ketidakutuhan internal yang diakibatkan oleh perpisahan primordial anak dari sang ibu pasca melahirkan mengakibatkan subjek itu selalu merasa dirinya sebagai yang asing. Kedua adalah ketidakutuhan eksternal. Dimana realitas terbentuk melalui proses pembiasaan atau *the symbolic*. *The Symbolic* memungkinkan subjek untuk mengetahui realitas, melalui bahasa, sekaligus mengurungnya di dalam penjara bahasa tersebut. Ia mampu menghadirkan realitas kepada subjek, melalui struktur penanda-petanda, suatu penanda tidak pernah menghadirkan petanda yang diasosiasikan dengan dirinya secara langsung, melainkan melalui keterhubungannya dengan penanda lainnya. (Adian, 2011: 129) Dengan adanya proses ini, maka realitas selalu menghadirkan dirinya sekaligus memiliki ekses akan keberadaan *the Other*. Berhubungan dengan ketidakutuhan internal, kehadiran *the Other* sebagai sesuatu yang asing memantapkan kegagalan subjek dalam mempertahankan keutuhan dirinya karena ia selalu membayangkan *the Other* sebagai sesuatu yang tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari dirinya. *The Other* dalam realitas simbolis kemudian membentuk diri subjek sebagai sesuatu yang koheren dan unik sekaligus terpisah dari apa yang tidak dapat diinklusi dan menandakan keberadaan subjek yang unik lainnya.

Ketidakutuhan subjek ini menandakan bahwa subjek itu bisa menjadi subjek apabila ada yang lain mengisinya. Aku ada karena dia pun ada. Oleh karena itu, kebutuhan subjek terhadap keterlibatan *the Other* tak terelakan lagi. Dalam kondisi subjek yang membutuhkan *the Other* sebagai syarat atas keberadaan subjek, bagaimana tentang relasi subjek dengan subjek lain sebagai *the Other*. Subjek yang lain juga dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk oleh *the Other*, yang juga berada dalam kondisi keserbakekurangan dan tak utuh ini, sama-sama ingin mencapai kepenuhan atas kondisi kekurangannya dan keutuhan. Dalam pemenuhan ini lah terjadi kebersitegangan antar subjek dan *the Other*. Kebersitegangan ini akhirnya disebut dengan relasi antagonis antara *the Other* dan subjek. Relasi antagonis ini lah yang membuat ketidakstabilan abadi di dalam diri subjek. (Adian, 2011: 130)

Relasi antagonis dipahami sebagai sebuah moment dalam usaha untuk mencapai sebuah kestabilan dalam sebuah ketegangan yang disebabkan oleh subjek yang berada dalam kondisi keserbakekurangan. Usaha untuk mencapai kestabilan itu bagi Laclau diartikan sebagai sebuah praktek artikulasi. Sedangkan hasil dari artikulasi disebut dengan diskursus. Diskursus sendiri diartikan sebagai totalitas yang terstruktur. Laclau dan Mouffe mengatakan bahwa “*The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse.*” (Laclau and Mouffe,2001 : 105). Praktek artikulasi berusaha membangun sebuah relasi dengan berbagai perbedaan yang disebabkan oleh keunikan subjek yang belum terartikulasikan. (Laclau and Mouffe,2001: 105). Usaha penstabilan relasi antara berbagai identitas yang belum terartikulasikan inilah dimana momen antagonism muncul. Dengan meletakkan praktek artikulasi pada relasi berbagai perbedaan yang sama sekali belum terartikulasikan, maka suatu pembentukan relasi antagonism adalah hal yang paling penting pada pembentukan identitasnya. Ia menaruh batas bagi dirinya dengan menghadapi sesuatu yang asing diluar sana.

Radikalitas subjek yang tak utuh ini membuat subjek yang dapat mengenal dirinya secara utuh yang menghasilkan subjek yang soliter, baik menurut Cartesian maupun Kantian itu tidak mungkin dalam masyarakat pluralis. Karena ada dua hal yang berlawanan dalam secara prinsip dapat ditemukan antara subjek modern dan mayarakat pluralis, yaitu subjek modern mengasumsikan bahwa keutuhan subjek itu mungkin karena subjek adalah subjek yang berpikir, yang dapat mengenali dirinya secara utuh, sedangkan masyarakat pluralitas mengasumsikan bahwa subjek itu berada dalam keadaan yang tidak stabil karena relasi antagonis yang diakibatkan oleh ketidakutuhan subjek dan kondisi keserbakekurangan.

#### 4.3. Subjek Paradoks Sebagai Penopang Subjek Politik Demokrasi Agonistik

Tak tereduksinya pluralitas dalam masyarakat mengakibatkan pemaknaan kembali tentang subjek politik. Subjek politik tidak lagi dimaknai sebagai subjek yang soliter, tetapi subjek yang bersitegang. Subjek yang bersitegang disebabkan

oleh subjek yang saling dalam kondisi ketidakutuhan dan sama-sama ingin mencapai sebuah keutuhan. Keberitegangan dapat dipahami sebagai kondisi tarik menarik antara subjek yang saling melengkapi dirinya masing-masing. Kondisi kebersitegangan ini akan menimbulkan relasi antagonis yang disebabkan karena adanya moment dalam usaha untuk mencapai kestabilan pada kondisi kebersitegangan antara subjek dengan *the Other*.

Bagi Schmitt, relasi antagonis merupakan watak politikal dari sebuah demokrasi karena Schmitt melihat karena takterjembataninya perbedaan yang ada dalam sosial masyarakat. Relasi antagonis dia pahami sebagai sebuah keadaan terbatas antara “kami” dan “mereka”. Perbedaan antara “kami” dan “mereka” ini muncul karena Schmitt melihat dari sudut pandang bagaimana konflik terjadi dalam masyarakat. Bagi dia ciri dari masyarakat adalah selalu mengambil tempat pada wilayah konflik dan itu merupakan kekuatan dari sebuah komposisi dalam masyarakat. (Mouffe,2000:44) Konflik bagi Schmitt dilihat sebagai kontradiksi antara identitas masyarakat. Identitas dipahami sebagai sesuatu yang terberi. (Mouffe, 2000: 54). Dengan melihat bahwa adanya ketakungkinan bersatunya identitas yang terberi dalam wadah relasi “kami” dan “mereka” dikarenakan oleh kemungkinan adanya “kami” selalu mengecualikan “mereka”. “mereka” selalu dipahami sebagai sesuatu yang ada diluar sana.(Mouffe, 2000:50) Schmitt merumuskan bahwa relasi “kami” dan “mereka” merupakan relasi “lawan” dan “kawan”. Relasi “lawan” dan “kawan” dipahami sebagai relasi permusuhan.

Dalam politik demokrasi agonistik, relasi antagonis bukanlah dipahami sebagai relasi antara lawan dan kawan, melainkan hubungan lawan yang berteman. Hal ini bisa terjadi karena politik agonistik tidak melihat hubungan lawan dan kawan dalam bingkai permusuhan, namun dalam bingkai perseteruan. Perseteruan ini mengandaikan adanya lawan yang terlegitimasi yang memiliki kesamaan karena berada dalam domain etiko-politik demokrasi, yaitu kebebasan dan kesetaraan.

Pergeseran antara relasi antagonis yang di pahami oleh Schmitt kepada relasi agonisme, merupakan usaha Mouffe untuk memasukkan wilayah politikal kepada wilayah politik, karena Mouffe berpendapat bahwa konsep politikal yang dijabarkan Schmitt dalam relasi “kami” dan “mereka” mengabaikan persoalan

mendasar dari politik liberal demokrasi, yaitu bagaimana relasi kuasa bermain dalam relasi sosial. Persoalan demos tidak mendapat bagian dalam konsep politikal. Namun Schmitt mengatakan bahwa yang politikal itu adalah politik dengan mengatakan bahwa yang politik itu adalah bagaimana membangun “kami” dengan membedakan dengan “mereka”. Bagi Mouffe, Schmitt terjebak pada persoalan etik, dia hanya memperbaiki konsep identitas komunitas, tetapi tidak memberikan solusi tentang persoalan politik. (Mouffe,2000:56-57) Karena politik berbicara bagaimana menyelesaikan konflik bukan menjawab apa itu konflik. Oleh karena itu, meletakkan hubungan lawan dan kawan dalam sebuah kondisi persetujuan bertujuan untuk menjinakkan hubungan “lawan” dan “kawan” tersebut agar tidak menjadi liar dengan cara melembagakan relasi antagonis tersebut. Pelembagaan ini tidaklah bersifat langgeng atau pun stabil. Pelembagaan dipertaruhkan dalam konflik agonistik yang didasarkan atas perselisihan yang saling menghegemoni.

Hegemoni bertujuan bukan untuk mencapai sebuah universalitas yang kokoh yang menghilangkan perbedaan partikular yang ada dalam masyarakat. Hegemoni adalah momen artikulatif. Artikulasi harus dilakukan melalui konfrontasi dengan praktek – praktek artikulatoris yang antagonis, sehingga hegemoni dapat dilakukan dalam sebuah kondisi selang-seling antara antagonis yang mengandaikan fenomena kesamaan dan ketidaksamaan. (Mouffe&Laclau,1994:135-136)

*“ The reason is that in order to speak of hegemony, the articulatory moment is not sufficient. It is also necessary that the articulation should take place through a confrontation with antagonistic articulatory practices in order words, that hegemony should emerge in a field criss – crossed by antagonisms and therefore suppose phenomena of equivalence and frontier effects”.*

Fenomena kesamaan dan ketidaksamaan merupakan usaha untuk mencari kemiripan atau logika equivalensi pada perbedaan partikular, namun tetap

menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Dari sini, terlihat sebuah paradoksal antara kesamaan dan perbedaan.

Paradoksal ini diakui oleh Mouffe sebagai salah satu bentuk radikalitas demokrasi pluralis karena ketidak terjembatannya relasi antagonistik pada relasi sosial. Mouffe mengatakan sebagai berikut

*"This is, among other things, the 'demonstration effect' that we have seen in operation in the case of the democratic revolution. A democratic struggle can autonomize a certain space within which it develops, and produce effects of equivalence with other struggles in a different political space. It is to this plurality of the social that the project for a radical democracy is linked, and the possibility of it emanates directly from the decentred character of the social agent, from the discursive plurality which constitutes them as subjects, and from the displacement which take place within that plurality."* (Mouffe&Laclau,1994:180-181)

Dalam rangka paradoksal antara kesamaan dan perbedaan inilah, hegemoni tidak dapat mencapai universalitas kesamaan secara total. Mouffe dan Laclau mengatakan bahwa

*" This total equivalence never exist: every equivalence is penetrated by a constitutive precariousness derived from the unevenness of the social. To this extent, the precariousness of every equivalence demands that it be complemented / limited by the by the logic of autonomy. It is for this reason that the demand for equality is not sufficient, but needs to be balanced by the demand for liberty, which leads us to speak of a radical and plural democracy."* (Mouffe&Laclau,1994:184)

Kondisi universalitas yang tak pernah mencapai ketotalan ini hanya bisa berlaku pada bentuk radikal demokrasi dan harus pluralis karena ketika hanya demokrasi radikal tanpa pluralis, maka logika equivalensi akan berhenti dalam satu titik, yang akan menjurus pada totalitas yang menafikan perbedaan –

perbedaan yang ada. Hal ini lah yang menjawab kenapa liberalisme tidak cocok dalam masyarakat pluralis karena liberalisme mengandaikan bahwa perbedaan yang ada dapat disatukan dalam bentuk konsensus yang bersifat final, seperti yang dikatakan oleh Rawls.

Dengan menerima radikalitas demokrasi yang pluralis ini, artinya perbedaan – perbedaan yang ada tidak bisa disatukan dalam ranah *a priori* karena subjek yang diasumsikan oleh demokrasi radikal yang pluralis ini adalah subjek yang unik, yang selalu bersitegang dalam rangka pemenuhan ketidakutuhannya. Kesenantiasaan bersitegang itu dikarenakan subjek itu bukanlah subjek yang terberi atau subjek yang transenden, tetapi subjek yang dibentuk oleh praktek – praktek artikulasi bahasa. Karena subjek itu dibentuk oleh artikulasi bahasa, maka subjek itu akan selalu mengikuti bahasa yang tidak pernah stabil yang mengakibatkan subjek tidak stabil. Meskipun subjek itu tidak stabil, tetap saja subjek itu merindukan kestabilan karena keserbakekurangan subjek yang merupakan akibat dari keterpisahan primordial. Ketika subjek itu merasa serba kurang, maka subjek itu ingin dipenuhi keserbakekurangannya tersebut.

Paradoks radikalitas demokrasi pluralisme antara ketidakstabilan dengan kestabilan, subjek yang bersitegang tidak lah cukup untuk menjelaskan kondisi paradoks tersebut karena dalam paradoks selain dari kebersitengan juga mengindikasikan adanya keinginan untuk mencapai sebuah keutuhan dalam logika kesamaan yang wujudkan dalam bentuk hegemoni. Oleh karena itu, subjek yang cocok dijadikan sebagai asumsi yang penopang paradoks radikalitas demokrasi pluralis ini adalah subjek paradoks.

Subjek paradoks tidak lagi membicarakan tentang bagaimana subjek itu dapat diketahui secara pasti seperti yang dilakukan subjek modern baik itu Cartesian maupun Kantian. Namun, subjek paradoks ingin menjelaskan bagaimana relasi subjek dengan realitas yang ada diluarnya atau objek. Relasi ini pada dasarnya pernah dibahas oleh Husserl, dengan teori *epoche*-nya, subjek dapat mengetahui objek, apabila objek itu direduksi. Reduksi ini bertujuan untuk mencapai realitas sebenarnya. Namun, Husserl masih terjebak pada keterpisahan subjek dari objek.

Dalam konsep subjek yang bersitegang, subjek itu selalu dipengaruhi oleh artikulasi – artikulasi bahasa. Artinya, subjek tidak mempunyai identitas. Identitas dibentuk oleh posisi subjek yang tidak pernah dapat benar-benar utuh dalam sebuah perbedaan. Identitas dibangun oleh keragaman wacana antara posisi subjek tanpa ada yang diutamakan, melainkan sebuah gerakan konstan yang bersifat *overdetermination* dan merupakan sebuah pemindahan-pemindahan subjek posisi. Dengan menyandarkan identitas pada gerakan konstan yang bersifat *overdetermination* maka identitas selalu dipenuhi oleh masalah yang begitu banyak dan kontradiktif oleh karena itu identitas selalu kontingensi dan genting. Identitas selalu berada dalam dipersimpangan posisi – posisi subjek dan tergantung pada bentuk-bentuk khusus indentifikasi. Dengan memahami bahwa identitas merupakan sebuah identifikasi maka hal ini memungkinkan bagaimana gerakan feminis dan perjuangan kontemporer lainnya, karena karakter utama mereka adalah posisi subjek selalu dibentuk melalui prasasti dalam hubungan sosial. (Mouffe, 1993: 77) Dengan demikian gagasan tentang kelas pekerja seperti pria, perempuan, kulit hitam atau penanda lainnya yang mengaju pada subjek kolektif, penanda ini harus dipahami sebagai kemiripan dan kesatuan mereka harus dilihat sebagai hasil dari fiksasi sebagian identitas melalui penciptaan titik nodal.

Dapat dipahami bahwa identitas sebagai proses identifikasi, artinya subjek itu berusaha untuk mengenali dirinya. Ketika dia berusaha mengenali dirinya dengan praktek artikulasi tersebut, maka sebenarnya subjek itu berusaha mencari apa yang ingin diketahui dari apa yang ditampilkan. Dalam konteks, inilah penulis melihat bahwa subjek itu bersifat paradoks.

Subjek paradoks adalah subjek yang mengamati realitas sekaligus yang diamati, tanpa mampu mencapai sebuah pandangan objektif dari realitas dirinya sendiri yang ada di dalam bingkai realitas tersebut. Ketika subjek itu mengamati, dia hanya dapat menangkap fenomenal tentang dirinya. Dia tidak mampu menangkap dimensi substansi dari dirinya karena ketika subjek ingin menangkap hal yang substansi dalam dirinya, subjek selalu mengelak dari dirinya sebagai *the Other*. Sebagaimana yang dikatan Carr bahwa ketika subjek mengamati dirinya sebagai objek maka dia akan selalu memunculkan *the Other* sebagai subjek yang

mengamati.(Carr, 1999: 116) Hal ini merupakan keunikan subjek. Seperti dengan orang yang sedang bercermin, dia dapat menunjuk yang di dalam cermin itu adalah dirinya sekaligus bukan dirinya. Artinya subjek selalu memunculkan *the Other* bagi dirinya. *The Other* inilah yang memungkinkan dirinya untuk menjadi subjek. Dengan adanya *The Other*, subjek itu dimungkinkan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek, sekaligus membuat dirinya tidak dapat mencapai hal yang substansi pada dirinya. Kehadiran *the Other* menunjukkan keberadaan subjek lain yang bukan dirinya. Dengan menerima keberadaan *the Other* sebagai sesuatu yang mungkin bagi subjek untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek, sekaligus membuat ketidakmungkinan subjek untuk mengenal dirinya membuat subjek sebagai subjek yang tidak utuh. Berbeda dengan subjek modern di mana subjek mampu mengenali dirinya secara utuh dengan mengasumsikan bahwa subjek dapat merefleksikan dirinya secara pasti, hal ini dikarenakan oleh subjek modern selalu mengatakan bahwa subjek selalu terpisah dengan objek yang diamati.

Dengan mengasumsikan subjek politik adalah subjek paradoks, maka ketika melakukan hegemoni untuk mencapai kesamaan dalam kerangka perbedaan partikular dalam ranah etiko politik atas prinsip kesetaraan dan kebebasan tidak akan pernah mencapai final atau sesuatu yang ajek, karena dalam mencapai kesamaan, subjek politik akan selalu menghasilkan subjek politik lain sebagai yang memungkinkan subjek politik untuk mengaktualisasikan dirinya sekaligus pembeda bagi dirinya yang membuat subjek politik tidak mampu mencapai keutuhan identitas politiknya. Keadaan seperti ini akan terjadi terus-menerus.

## Bab 5

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan pada penjelasan sebelumnya, penulis telah menunjukkan bahwa ketidak memadainya subjek modern menjawab kondisi pluralisme masyarakat. Dimana subjek modern berangkat dari sebuah asumsi bahwa subjek itu adalah subjek yang soliter, dan utuh. Keutuhan subjek modern membuat subjek modern mampu menentukan kehendak dirinya sendiri dan selalu bersifat independen, sehingga subjek modern telah mengabaikan peran kolektif dan menghilangkan keadaan ontologis dari kondisi politikal demokrasi pluralisme, sebagaimana yang dilakukan oleh Rawls dengan meletakkan subjek pada posisi selubung ketidak tahuan dengan menyembunyikan informasi khusus tentang subjek politik yang bertujuan untuk menghindari subjek dari hal-hal yang dapat mempengaruhi putusan subjek atas yang adil. Posisi selubung ketidaktahuan ini didukung oleh *reasonable* dan rasionalitas, dimana subjek mampu menangkap hal yang baik secara umum untuk mencapai *fairness*. Dengan meletakkan subjek pada logika *reasonable* ini subjek politik dapat mencapai sebuah konsensus. Pada dasarnya Rawls telah mengakui bahwa masyarakat itu bersifat pluralis dan selalu diikuti oleh informasi khusus sebagai ciri dari masyarakat itu sendiri, namun Rawls dengan sengaja menyembunyikannya dalam selubung ketidaktahuan agar konsensus mungkin dilakukan.

Keadaan ontologis politikal demokrasi pluralisme adalah sebuah relasi antagonis. Relasi antagonis disebabkan oleh adanya saling tarik menarik antara identitas individu antara “kami” dan “mereka”. Ketika “kami” ingin menginklusi mereka pada wilayah “kami” maka akan selalu mengecualikan yang “mereka”. Relasi antara “kami” dan “mereka” tidak bisa dijembatani dalam sebuah politik konsensus yang selalu cenderung untuk mendamaikan relasi antagonis dalam sebuah wadah kesepakatan. Ketidakmungkinan kesepakatan ini terjadi karena tak terelakkannya kondisi saling mengecualikan antara relasi ‘kami’ dan ‘mereka’ ini. Namun dengan

membiarkan kondisi takterjembatannya relasi antara “kami’ dan ‘mereka’ ini mengakibatkan hilangnya wilayah politik dalam kerangka etiko politik yang didasari oleh prinsip kebebasan dan kesetaraan, dimana politik selalu berbicara tentang usaha untuk menyelesaikan relasi antagonis ini agar tidak menjadi liar dan tak terkontrol.

Untuk tidak menghilangkan relasi antagonis dan menjaga kondisi politik dari demokrasi pluralisme, maka politik agonisme mencoba memberikan penyelesaian atas kondisi paradoks tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya politik agonisme merupakan sebuah politik yang memperjuangkan keberagaman yang terus menerus memperjuangkan persatuan dalam keberagamannya namun tidak mengabaikan perbedaan yang ada. Politik agonisme tidak bisa dilepaskan dari kerangka berfikir equavalensi dan deferensiasi atau logika persamaan diatas perbedaan dalam kerangka hegemoni. Hegemoni dipahami sebagai moment artikulatif untuk mencapai universalitas diatas sebuah perbedaan partikular. Artikulasi harus dilakukan berdasarkan konfrontasi antar praktek-praktek artikulatoris yang antagonis, sehingga hegemoni dapat dilakukan dalam sebuah kondisi selang-seling antara antagonis yang mengandaikan fenomena kesamaan dan ketidaksamaan partikular. Hegemoni yang dilakukan dalam kerangka fenomena kebersatuan dan ketidaksamaan partikular tidaklah bersifat langgeng dan tetap, sebagaimana yang diasumsikan oleh politik liberal yang ditopang oleh subjek yang soliter dan utuh.

Dengan pemahaman subjek politik bukan lah sebuah subjek yang berada dalam kepenuhan identitas, tapi subjek yang selalu berada dalam sebuah kondisi keserbakekurangan. Kondisi keserbakekurangan ini disebabkan oleh adanya sesuatu yang tidak dapat diinkluskikan ke dalam diri subjek, sehingga subjek tidak dapat mencapai keutuhan akan dirinya. Kondisi ketidakutuhan ini disebabkan karena subjek ia selalu memunculkan *the Other* bagi dirinya. *The Other* inilah yang memungkinkan dirinya untuk menjadi subjek. Dengan adanya *The Other*, subjek itu dimungkinkan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek, sekaligus membuat dirinya tidak pernah utuh. Karena kehadiran *the Other* menunjukkan keberadaan subjek lain yang bukan diriku. Dengan menerima keberadaan *the Other* sebagai sesuatu yang mungkin bagi subjek untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek, sekaligus

membuat ketidakmungkinan subjek untuk mengenal dirinya sebagai subjek yang utuh ini lah yang penulis sebut dengan subjek paradoks. Subjek paradoks bertujuan untuk menghindari usaha hegemoni dalam fenomena kebersatuan dalam sebuah perbedaan partikular dari sebuah kondisi yang tetap dan mengabaikan sebuah relasi antagonis sebagai keadaan ontologis dari masyarakat pluralis,

Dengan mengasumsikan subjek politik adalah subjek yang paradoks maka ketika dilakukan pencarian kesamaan dalam perbedaan dalam kerangka hegemoni, subjek paradoks memberikan ruang pada relasi antagonis, karena subjek paradoks selalu menyisakan ruang atas ketidak utuhan subjek yang selalu bersitegang dalam mencapai keutuhan.

Dengan mengasumsikan subjek politik sebagai subjek paradoks, pada dasarnya bertujuan untuk menghindari keputusan politik yang bersifat final karena adanya kontingensi ketidak utuhan pada diri subjek politik dan menghindari keputusan politik dari faktisitas kolektif, yaitu relasi antagonis yang selalu bersitegang yang dapat memicu konflik identitas yang menjadi kondisi ontologis dari masyarakat pluralis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2011. *Teori Militansi: Esai-esai Politik Radikal*. Depok: Kukusan
- Adian, Donny Gahral. 2001. *Matinya Metafisika Barat*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Adian, Donny Gahral. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Kukusan
- Adian, Donny Gahral. 2006. *Demokrasi Kami*. Depok: Koekoesan
- Baldwin, Thomas. 2007. *Reading Merleau Ponty: on Phenomenology of Perception*. London: Routledg
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Carr, David. 1999. *The Paradox of Subjektivty: The Self in the Transendental Tradition*. Oxford: Oxford University Press
- Danujaya, Budiarto. 2012. *Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks*. Jakarta: Kompas
- Fukuyama, Francis. 2004. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Terj: M.H. Amrullah. Yogyakarta: Qalam
- Gabriel, Markus & Zizek, Slavoj. 2009. *Mythology Madness and Laughter : Subjectivity in German idealism*. New York: Continuum International Publishing Group
- Hardiman, Budi. 2007. *Filsafat Modern : Dari Marchiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta : Gramedia
- Hardiman, Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta : Karnisius
- Heidegger, Martin. 1993. *Writing From Being and Time to the Task of Thinking*
- Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal. 1994. *Hegemony & Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics*. London : Verso
- Mouffe, Chantal. 1993. *The Return of the Political*. London: Verso
- Mouffe, Chantal. 2000. *The Democratic Paradox*. London : Verso.

Mulhall, Stephen. 2005. *Heidegger and Being and Time*. New York: Routledge

Rawls, John. 1996. *Political Liberalism*. New York : Columbia University Press

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard: Harvard University Press

Rene, Decartes. 1998. *Medutation on First Philosophy*. Indianapolis: Hackett Publishing Company

Schmitt, Carl. 1996. *Concept of The Political*. Chicago : The University of Chicago Press.

